



WRM Bulletin 236
World Rainforest Movement
Maret 2018

**Perempuan, Perkebunan Pohon dan Kekerasan:
Membangun perlawanan**



Artikel-artikel dalam Buletin ini ditulis oleh:

Réseau des acteurs du Développement Durable (RADD) Cameroun / SawitWatch Indonesia / Carro de Combate / la Synergie Nationale des Paysans dan Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM) / CFR- Learning & Advocacy India / The Natural Resource Women Platform (NRWP) Liberia / Núcleo Tramas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) Brasil / WALHI - Teman Bumi Indonesia / Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) Camerún.

Sudut pandang organisasi

Perempuan dan perkebunan: Kekerasan yang tersembunyi

Buletin ini, di Hari Perempuan Internasional, adalah sebuah seruan solidaritas secara langsung dan radikal bersama para perempuan yang menderita, melawan, mengorganisir dan menggerakkan untuk melawan kekerasan dan pelecehan sehari-hari yang ditimbulkan oleh perkebunan industri.

Pada Hari Perempuan Internasional, buletin ini berupaya untuk menyorot dan mengancam banyak realitas yang umumnya tersembunyi di balik "dampak khusus" terhadap perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan monokultur.

WRM telah mendukung perjuangan melawan perkebunan industri selama lebih dari dua dekade. Dalam proses ini, kami telah belajar tentang salah satu dampak paling kejam — dan pada saat yang sama juga salah satu bentuk penindasan, eksploitasi, dan dominasi yang paling kejam: yaitu **pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan** sebagai akibat dari pendirian hutan tanaman industri. Saat Hari Perempuan Internasional dirayakan pada tanggal 8 Maret, dengan buletin ini kami ingin membantu memperkuat suara dan kisah ribuan perempuan yang menderita dan mengalami kekerasan ini; **kami ingin memperlihatkan apa yang selama ini secara sistematis ditutup-tutupi. Dan kami juga ingin memberikan penghormatan kepada semua perempuan, yang — terlepas dari segala kesulitan yang mereka hadapi — mengorganisasi, melawan, dan mempertahankan kegembiraan dan harapan bahwa kesempatan dan harapan itu masih ada.**

Kekerasan Historis dan Sistematis

Pembentukan model hutan produksi monokultur skala besar mengharuskan penerapan kekerasan luar biasa terhadap sistem reproduksi kehidupan; yang meliputi sistem organisasi kolektif, kedaulatan pangan, pengetahuan leluhur, di antara banyak aspek lainnya. Karenanya, kekerasan ini juga berdampak khusus terhadap perempuan, yang merupakan pilar mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kami bisa mengacu pada kasus perkebunan masa lalu di Amerika, dan kekerasan terhadap budak, khususnya kasus yang sangat brutal terhadap para perempuan.

Aktivis dan penulis, Silvia Federici, mengklaim bahwa "kapitalisme dimulai dengan perang melawan perempuan" (1). Penelitian yang dilakukannya telah menunjukkan bagaimana, sejak awal, kapitalisme diperlukan untuk menghancurkan sistem-sistem reproduksi, untuk menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja upahan dan ketergantungan terhadap pasar. Dan tentu saja, **untuk menghancurkan beragam sistem reproduksi kehidupan dalam perluasan "perkembangan kapitalis," metode yang "efektif" dan gigih adalah dengan meyerang, membunuh dan menguntit para perempuan.**

Pemeriksaan, kekerasan fisik dan psikologis, pelecehan, penganiayaan, pekerjaan dengan imbalan seks, pemukulan, kehamilan, kehadiran penjaga bersenjata di dalam dan di sekitar rumah dan komunitas mereka, upah yang lebih rendah dan hari kerja yang lebih lama, pekerjaan yang tidak dibayar, penggunaan produk beracun yang terus menerus tanpa perlindungan, kondisi kerja yang menyedihkan, dampak pada kesehatan reproduksi dan seksual mereka, ketidakmampuan untuk membuat keputusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah, kehilangan akses ke tanah, perampasan mata pencaharian dan rezeki mereka – yang berarti mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi lebih sulit, lebih banyak dan lebih lama— hanyalah beberapa dari “dampak tersembunyi” yang dibebankan oleh perkebunan industri pada tubuh dan kehidupan perempuan-perempuan saat ini.

Meningkatnya militerisasi di kehidupan sehari-hari para perempuan ini **juga semakin mengagungkan model maskulinitas yang keras dan agresif**, yang sebagian besar bertindak dengan impunitas total. Ini adalah jenis impunitas yang sama yang dinikmati oleh perusahaan yang memonopoli tanah-tanah masyarakat yang subur, mencemari sungai, menghancurkan hutan, menggusur masyarakat, dan menyewa agen keamanan swasta untuk "melindungi" investasi mereka.

Sayangnya kekerasan sehari-hari ini **tidak bertentangan dengan nilai-nilai pada institusi internasional seperti Bank Dunia atau PBB**, yang sangat memengaruhi politik internasional dan menganjurkan perluasan ekonomi kapitalis ke seluruh penjuru planet ini. Di balik kerangka pengaman perdagangan mereka, kode etik dan tanggung jawab sosial, adalah kebijakan dan proyek yang memperkuat sistem, yang sejak awal pembentukannya, dan bisa jadi selamanya - **bersifat patriarki dan rasis** secara struktural.

Namun demikian, di tengah-tengah konteks yang begitu kejam terhadap mereka, terdapat para perempuan yang mengambil kendali untuk mengatur dan memobilisasi melawan

perambahan atas tanah dan kehidupan mereka. **Peran mereka dalam perlawanan ini sangat penting** dan telah menjadi fokus beberapa buletin WRM (2).

Buletin ini memuat dua artikel dari **Indonesia** yang menguraikan pelecehan sistemik yang harus dijalani perempuan (dan anak perempuan) di dan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Yang satu berfokus pada banyaknya pelanggaran perburuhan, dan yang lainnya menyoroti kekerasan yang lebih struktural dari perkebunan-perkebunan ini. Demikian pula, tiga artikel dari **Kamerun** yang memberi tahu kami tentang situasi perempuan di sana dalam menghadapi perkebunan monokultur kelapa sawit. Salah satunya berfokus pada dampak nasional dan pelanggaran yang disebabkan oleh perluasan perkebunan ini; yang kedua menceritakan jenis-jenis kekerasan spesifik yang ditimbulkan, serta seruan untuk perubahan; dan yang ketiga adalah kesaksian artikel tentang bagaimana suatu komunitas telah hidup dan melawan sejak perusahaan SOCAPALM, tiba di tanah mereka. Artikel lain berupaya merangkum kasus-kasus dua komunitas — satu di **Guatemala** dan lainnya di **Kolombia** — di mana perempuan adalah yang paling giat berjuang untuk mempertahankan tanah dan mata pencaharian mereka melawan perkebunan kelapa sawit. Sebuah artikel dari **India** memperingatkan kami tentang perluasan perkebunan yang sedang tumbuh melalui program *offset* pemerintah, dan bagaimana perempuan yang terkena dampaknya juga adalah perlawanan di negara tersebut. Artikel lain dari **Liberia** menggarisbawahi pentingnya memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana perempuan di sana mengupayakan untuk mencapai hal ini. Dan akhirnya, sebuah artikel dari **Brazil** memberi tahu kami tentang bahaya dan dampak dari paparan agrokimia terhadap perempuan, yang harus mereka hadapi sebagai tugas harian di perkebunan industri.

Maka dari itu, Buletin ini juga menyerukan solidaritas langsung dan radikal bersama para perempuan yang menderita, melawan, mengatur dan memobilisasi perempuan lain untuk melawan kekerasan dan pelecehan sehari-hari yang ditimbulkan oleh perkebunan industri.

(1) "Caliban and the Witch. Women, the body and Primitive Accumulation," Silvia Federici, 2004. Anda dapat mengunduh buku ini secara gratis di: <https://libcom.org/files/Caliban%20and%20the%20Witch.pdf>

(2) Lihat contoh:

Buletin 211, February 2015: Women in Resistance: Defending Territories and Life, <https://wrm.org.uy/bulletins/issue-211/>

Buletin 200, March 2014, The Struggle of Women: Everyone's Struggle, <https://wrm.org.uy/bulletins/issue-200-3/>

Buletin 187, February 2013, Women Resisting, <https://wrm.org.uy/bulletins/issue-187/>

Kamerun: Aktivis Perkotaan dan Pedesaan Melawan Penganiayaan oleh Hutan Tanaman Industri terhadap Perempuan

Dari perkosaan, penggeledahan tubuh dan bagian pribadi secara paksa, hingga risiko kehilangan nyawa: artikel ini mendorong kami untuk mengutuk kekerasan yang dialami perempuan di sekitar hutan tanaman industri di Kamerun.

Pada akhir tahun 2000, demam akan lahan pertanian di Afrika untuk operasi hutan monokultur skala besar meningkat. Saat ini, demam ini meningkat seiring dengan kebijakan yang muncul yang menganggap inisiatif ini sebagai proyek pengembangan hebat yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Sebagian besar, proyek-proyek ini diterima dengan baik oleh pengambil keputusan di tingkat nasional dan lokal di daerah di mana mereka dilaksanakan. Sangat penting bagi kami memposisikan diri sebagai aktivis untuk menunjukkan dan memahami kebutuhan untuk melindungi orang-orang diluar sistem ini.

“Sekarang adalah waktunya: Aktivis Pedesaan dan Perkotaan Mengubah Hidup Perempuan” adalah tema yang dipilih tahun ini oleh PBB Perempuan-Afrika pada kesempatan Hari Perempuan Internasional ke-33. Bagi kami para aktivis yang berkomitmen untuk meningkatkan taraf kehidupan perempuan, masalah ini memberi kami kesempatan untuk mempertanyakan opini publik tentang kasus khusus dimana perempuan pedesaan yang menjadi korban perampasan tanah. Momen ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk berbicara tentang pelecehan yang mengorbankan perempuan-perempuan ini, berbagi kemungkinan untuk mengambil tindakan guna mengintensifkan perjuangan melawan diskriminasi dan pelanggaran.

Kekerasan terhadap Perempuan yang Hidup Berdampingan dengan Perkebunan

Tidak bisa dipungkiri bahwa proyek pertanian skala besar menciptakan sistem pemiskinan terhadap populasi yang mengelilingi mereka, alih-alih menawarkan pengembangan yang diklaim oleh perusahaan dan sekutu mereka, perempuan, yang merupakan pusat dari unit keluarga, adalah yang paling terdampak

Di seluruh Afrika, perempuan yang tinggal di dalam atau di di sekitar perkebunan pohon monokultur besar mengalami kekerasan serupa:

- **Risiko perkosaan di atau di di sekitar ladang meningkat bagi perempuan yang tinggal di dekat perkebunan. Para pemerkosa biasanya tidak dihukum.** Perkebunan cenderung menempati tanah yang mengelilingi masyarakat, dan oleh karena itu, untuk mencapai petak-petak kecil tempat mereka menanam makanan di tepi perkebunan, perempuan harus banyak berjalan melalui perkebunan. Jalur ini biasanya milik perusahaan perkebunan, dan karenanya hanya sedikit yang melaluinya, dengan pengecualian penjaga keamanan;
- Di bidang eksploitasi industri, perempuan yang tinggal di di sekitar perkebunan **digeledah, yang berarti hilangnya privasi mereka. Mereka diperkosa, disiksa dan diseret ke pengadilan** karena mereka kedapatan memiliki buah kelapa sawit atau sedikit minyak sawit, bahkan ketika itu berasal dari pohon kelapa sawit mereka sendiri. **Mereka dilarang mengkonsumsi produk sampingan kelapa sawit**, meskipun pada kenyataannya produk-produk ini adalah dasar dari bahan makanan mereka. Petugas keamanan bahkan **menyerbu masuk ke rumah-rumah** untuk memeriksa apa yang sedang dimasak oleh perempuan, dan mengobrak abrik rumah-rumah untuk mencari minyak sawit. **Para penjaga menghancurkan minyak apa pun yang mereka temukan**, bahkan ketika para perempuan mengatakan itu berasal dari pohon palem mereka sendiri. Penjaga juga menghancurkan minyak tradisional yang dijual perempuan di pasar lokal dekat perkebunan;
- Untuk mendapatkan mata pencaharian, perempuan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja perkebunan, di mana mereka tunduk pada jadwal yang membuat mereka tidak mungkin untuk mengawasi pendidikan anak-anak mereka;
- **Masa depan anak-anak terganggu.** Anak-anak sering kali tidak sekolah, anak-anak juga menjadi pekerja tidak tetap dan terlalu dieksploitasi, bahkan ketika mereka masih di bawah umur; atau mereka menganggur. Terdapat peningkatan persentase anak-anak yang tinggal di di sekitar perkebunan yang beralih ke narkoba, kenakalan, atau alkohol, dan yang berujung masuk ke dalam penjara;
- Para perempuan yang mencoba untuk menolak kemajuan perkebunan ke tanah komunitas mereka terancam oleh sistem yang dipasang oleh perusahaan yang sama mengeksploitasi tanah mereka, dan **kehidupan mereka dalam bahaya**;

- Tanah tempat perempuan menghasilkan makanan untuk keluarga diambil dari mereka. Mereka sering dipindahkan tanpa ganti rugi yang masuk akal atau berkelanjutan. Mereka terpaksa melakukan perjalanan jarak jauh, hingga puluhan kilometer, untuk menemukan tanah yang subur. Mereka sering menyewa tanah setiap musim untuk merencanakan panen sampai tanahnya habis. Akibatnya, keluarga mereka tidak memiliki cukup makanan, atau mereka terpaksa makan makanan berkualitas rendah. **Semua masyarakat yang hidup berdekatan dengan perkebunan pohon monokultur identik dengan kelaparan, kekurangan gizi dan ketergantungan pangan;**

- Hutan dan keanekaragaman hayati - yang merupakan sumber dari nilai-nilai tradisional perempuan ini, dan tempat mereka memperoleh dasar sumber daya ekonomi dan budaya mereka - secara harfiah dihancurkan, memperburuk perubahan iklim. Ini membuat perempuan **lebih rentan**, karena secara drastis menurunkan pendapatan mereka.

- Di seluruh Afrika, **janji-janji indah** yang dibuat untuk masyarakat oleh perusahaan-perusahaan yang merampas tanah mereka — seperti pemasangan infrastruktur sosial (pasokan air, konstruksi dan peralatan untuk sekolah dan rumah sakit) — tidak pernah ditepati;

- **Masyarakat tidak memiliki air layak minum**, karena air tanah telah terkontaminasi oleh bahan kimia yang digunakan di perkebunan;

- Pada komunitas di sekitar perkebunan, pabrik telah mengeringkan air mereka, yang berdampak terhadap **kesehatan** para perempuan dan keturunan mereka dengan risiko permanen;

- Semua kemalangan yang menimpa para perempuan ini berawal dari pembangunan perusahaan yang mengeksploitasi tanah mereka.

Saatnya aktivis untuk bertindak!

Kami menyarankan tindakan mendesak dalam jangka pendek dan menengah. Lebih dari sebelumnya, inilah saatnya untuk mengekspresikan solidaritas kami sebagai perempuan. Dengan hanya menggabungkan kekuatan, energi, sumber daya dan strategi, kami dapat memajukan gerakan melawan kekerasan terhadap perempuan yang tinggal di sekitar perkebunan pohon monokultur. Kami harus mengekspresikan solidaritas ini melalui aliansi

formal dan informal yang dimulai pada tingkat komunitas, dan yang meningkat di seluruh negara dan subkawasan, hingga mencapai tingkat benua Afrika dan tingkat global.

Waktunya telah tiba untuk mendengarkan suara-suara dan perjuangan jutaan perempuan yang tinggal di sekitar perkebunan, dan untuk **bangkit dalam solidaritas** dengan mereka untuk membantu mereka mengubah hidup mereka. Jika kami tidak melakukan apa-apa, kami akan berakhir menjadi kaki tangan sistem imperialis — sistem yang menjanjikan pembangunan eksklusif, menciptakan generasi populasi yang rentan, memperbesar diskriminasi terhadap perempuan dan menimbulkan imigrasi informal. Masalah-masalah dengan tempat-tempat di mana mereka tinggal adalah apa yang mendorong orang-orang muda untuk memperjuangkan mimpi yang membahayakan hidup mereka.

Sekarang adalah saatnya beraksi!

Hampir tiga bulan lalu, Asosiasi Kamerun, Jaringan Aktor untuk Pembangunan Berkelanjutan (RADD, dengan akronim Prancisnya), dan organisasi serupa meluncurkan petisi Afrika untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan ini. Kami mengundang Anda untuk bergabung, dengan menandatangani dan meminta orang lain untuk ikut menandatangani.

Setelah mengunjungi komunitas-komunitas yang terkena dampak di Kamerun, Gabon dan Sierra Leone, kami merasa perlu membawa keluhan perempuan ini kepada para pembuat keputusan. Dalam petisi ini, perempuan yang terdampak – sebagian besar dari mereka – menuntut agar tanah mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah mereka. Dengan menandatangani petisi ini, Anda akan membantu memaksa mereka yang berada dalam posisi pengambilan keputusan strategis untuk meninjau kebijakan mereka dan memikirkan kembali cara bagaimana pengalihan tanah di negara-negara Afrika.

Mengintensifkan Perjuangan untuk Pertahanan Hak-Hak Perempuan

Mulai sekarang, khususnya dihadapkan dengan keadaan genting dari situasi, perempuan yang terdampak ini meminta dukungan pada hal-hal berikut:

- Bantuan dan bimbingan hukum untuk perempuan yang terdampak, pemimpin perempuan dan aktivis perempuan yang mendapatkan ancaman dan diseret ke pengadilan karena mereka telah menentang berbagai pelanggaran. Tuntutan ini

sangat penting, karena menentang polisi tidak ada gunanya dan seringkali membuat perempuan semakin terpapar kekerasan;

- Penguatan pengetahuan perempuan yang terkena dampak tentang bagaimana mempertahankan hak-hak mereka. Seringkali, khususnya di daerah pedesaan terpencil, perempuan dibiarkan tanpa akses ke informasi, yang sangat penting dalam pengorganisasian untuk menuntut penghormatan terhadap hak-hak mereka;
- Keamanan untuk aktivis yang hidupnya sering terancam;
- Penciptaan dan pengembangan alternatif ekonomi. Perempuan-perempuan ini perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk mewujudkan otonomi;
- Akses ke infrastruktur sosial (air minum, energi, pendidikan, kesehatan ...)
- Menghormati dan menepati perjanjian yang ditandatangani. Setelah beroperasi, perusahaan perkebunan yang mengeksploitasi tanah ini gagal untuk menghormati komitmen sosial yang telah mereka buat dengan masyarakat setempat;
- Meninjau proses transfer tanah yang tidak memperhitungkan pendapat masyarakat di sekitar yang didiskriminasi dan dirugikan dari ruang pengambilan keputusan.

Ini adalah beberapa bidang tindakan, di antara banyak lainnya, yang mungkin untuk dilakukan, di mana partisipasi mendesak diperlukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para perempuan pedesaan ini.

Mari kami bergabung bersama dengan aktivis di seluruh dunia untuk menghentikan diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan-perempuan ini!

Marie Crescence NGOBO.

Sekretaris Eksekutif, Réseau des acteurs du Développement Durable - RADD, Cameroun

(Network of Actors for Sustainable Development)

Indonesia: Eksploitasi dan Pelanggaran Hak-Hak Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengubah perempuan kehilangan tanah dan membeli makanan yang tumbuh di atas tanah mereka sendiri. Mereka menjadi tenaga kerja murah di perusahaan perkebunan, tanpa keselamatan dan perlindungan kesehatan yang memadai.

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia disokong oleh modal besar, ketersediaan lahan, tenaga kerja murah dan tingginya permintaan internasional akan minyak kelapa sawit. Sejak tahun 2000, area perkebunan kelapa sawit telah meningkat untuk memenuhi permintaan pasar minyak kelapa sawit internasional. Indonesia pun telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan produksi Minyak Sawit Mentah (CPO) hingga 40 juta ton per tahun pada tahun 2020. (1) Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Indonesia, sebuah badan yang dikelola negara yang mewakili industri perkebunan, meluncurkan Visi Indonesia untuk tahun 2045 dengan satu target, yaitu meningkatkan produksi CPO hingga 60 juta ton per tahun. (2)

Indonesia saat ini memiliki 16,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dan berencana untuk memperluas area yang ditempati oleh perkebunan kelapa sawit menjadi di sekitar 20 juta hektar lahan, yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. **Ekspansi besar-besaran ini terutama bertumpu pada dua faktor utama: rendahnya upah tenaga kerja dan kemudahan mendapatkan tanah.**

Menurut Menteri Pertanian Indonesia, kelapa sawit adalah salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, dengan nilai ekspor 250 triliun rupiah Indonesia per tahun. (3) Minyak kelapa sawit adalah komoditas ekspor untuk negara tersebut, terbukti dari nilai produk yang berasal dari minyak sawit yang memberikan kontribusi 75 persen untuk ekspor sektor non-migas. Di luar itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar seperti ini menyerap banyak tenaga kerja – secara keseluruhan. (4) Namun jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang disediakan oleh pertanian petani skala kecil - baik dari segi jumlah dan kualitas pekerjaan -, kontribusi industri kelapa sawit ke pasar tenaga kerja terlihat tidak terlalu mengesankan.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Pertama, marginalisasi petani, khususnya perempuan. **Perkebunan kelapa sawit telah mengubah komunitas petani menjadi komunitas yang tidak memiliki tanah dan memaksa mereka untuk menjual tenaga mereka ke perkebunan.** Perebutan tanah oleh perusahaan kelapa sawit dan keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat jelas mempengaruhi kemampuan perempuan untuk menghasilkan makanan dan mengakses tanah. Perluasan perkebunan kelapa sawit ke lahan yang sebelumnya tersedia untuk pertanian petani **mengubah perempuan dari produsen makanan menjadi pembeli makanan dan tenaga kerja murah untuk perusahaan perkebunan.** Mata pencaharian dan praktik pertanian tradisional mereka sebagai penghasil makanan terganggu atau dirampas oleh perkebunan kelapa sawit, perempuan-perempuan ini sering dibiarkan tidak punya banyak pilihan selain mencari pekerjaan sebagai buruh di perkebunan. Perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh harus beradaptasi dengan rutinitas standar, pola kerja dan mekanisme kerja di perkebunan.

“Sejak perusahaan datang, **kami dipaksa menjual tanah kami kepada perusahaan.** Perusahaan menerima kami sebagai pekerja lepas dengan syarat kami menjual tanah kami kepada perusahaan. Mayoritas pekerja perempuan di sini adalah mereka yang menjual tanah mereka ke perusahaan. Sekarang status kami adalah buruh lepas, ”kata Ad, seorang perempuan yang bekerja sebagai buruh lepas di perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Grup Sipef di Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua, bagi banyak perempuan, kondisi kerja di perkebunan sangatlah berbahaya. Hubungan dan perjanjian kerja untuk perempuan di perkebunan dilakukan secara informal, dimana mereka seringkali memiliki kontrak kerja jangka pendek, yang akhirnya meninggalkan mereka tanpa jaminan kerja jangka panjang perusahaan memberlakukan perjanjian kerja tidak jelas, perjanjian kerja tidak berdokumen dan sistem upah berbasis target. Asosiasi LSM Indonesia, Sawit Watch, memperkirakan bahwa jumlah orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2016 melebihi 10 juta. Dari jumlah tersebut, 70 persen dipekerjakan sebagai pekerja lepas, dengan mayoritas pekerja lepas adalah perempuan. (5) Para perempuan ini bekerja di 15 dari 16 jenis pekerjaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari pembukaan lahan hingga panen.

Istri Buruh: Terpaksa bekerja tanpa upah

Para pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit sering diabaikan dan disepelekan, padahal kehadiran mereka sangat mempengaruhi proses produksi. **Para perempuan ini tidak dianggap sebagai pekerja perusahaan, sehingga mereka bahkan tidak mendapatkan hak yang layak.**

Perusahaan perkebunan sebagian besar menetapkan target terlalu tinggi untuk pekerja yang memanen tandan buah, sehingga pemanen hanya dapat mencapainya dengan bantuan anggota keluarga, seringkali istri para pekerja. Tambahan pekerja dari anggota keluarga ini tidak memiliki ikatan formal dengan perusahaan. **Para perempuan yang membantu suami mereka dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar, karena sangat sulit bagi suami mereka untuk mencapai target panen yang sangat tinggi yang dikenakan pada mereka. Jika target tidak tercapai, perusahaan akan melakukan pemotongan upah.** Oleh karena itu, bagi para buruh ini, pilihan "terbaik" adalah memiliki anggota keluarga, biasanya istri pekerja, bekerja bersama mereka. Peran istri kebanyakan mengambil buah yang jatuh, membersihkan jalur panen, menghaluskan pelepah dan memindahkan tandan buah segar ke tempat penampungan. **Mereka bekerja tanpa peralatan keselamatan dan kesehatan yang memadai.**

Beberapa perusahaan perkebunan bahkan membuat kebijakan yang mewajibkan anggota keluarga pemanen untuk menyediakan pekerjaan gratis semacam itu. Jika pemanen tiba sendirian, pekerja itu dianggap tidak ada atau mandor akan membawa seorang pembantu yang upahnya harus dibayar oleh pemanen sendiri.

Di Perusahaan LS di Sumatera Utara, Buruh pemanen yang tidak membawa istri ke tempat kerja dianggap tidak ada. Menurut salah seorang pemanen di perusahaan ini, "Setiap pekerja yang datang bekerja akan diminta membawa pembantu. Jika tidak, maka pulanglah ". Perusahaan SLM di Kalimantan Tengah, telah menetapkan target kerja 180 tandan buah per hari untuk pemanen. **Tidak mungkin bagi satu orang pekerja untuk mencapai target ini setiap hari selama periode waktu tertentu.** Dengan catatan 100 tandan adalah target pekerjaan suami, sedangkan sisanya adalah target istri sehingga terdapat aturan tidak tertulis bahwa pekerja panen di perkebunan ini diharuskan membawa istri mereka ke lokasi. Jika tidak, asisten atau mandor perkebunan akan membawa seseorang yang membantu pekerja panen. Upahnya harus dibayar sendiri oleh pemanen.

Jika diasumsikan bahwa satu orang pekerja pemanen mencakup 2 hingga 3 hektar perkebunan perusahaan, dapat dibayangkan berapa banyak perempuan yang bekerja tanpa upah di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ketika perempuan tidak bekerja untuk membantu suami mereka, mereka bekerja sebagai buruh harian tanpa persetujuan kerja resmi. Upah buruh harian jauh lebih rendah daripada upah pekerja tetap, dan seringkali tidak mencakup tunjangan sosial atau kesehatan. Tentu saja model hubungan kerja ini menimbulkan masalah dalam konteks perlindungan pekerja, tidak hanya dalam hal upah, tetapi juga dalam hal keamanan kerja, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya.

Pekerja perempuan: Menjadi buruh harian lepas yang permanen

Salah satu aspek untuk menggambarkan informalisasi hubungan kerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah buruh harian lepas. Ada tiga jenis pekerja lepas di perkebunan kelapa sawit: Pertama, pekerja lepas dengan ikatan permanen, dengan kontrak tahunan, di mana sistem dan beban kerja pekerja lepas sama dengan pekerja tetap, tetapi jumlah hari kerja per bulan terbatas di bawah 20 hari. Kedua, semi-permanen, dengan kontrak untuk pekerjaan tertentu pada tingkat beban kerja yang ditetapkan. Dalam bentuk ikatan ini, kepastian kerja tergantung pada ada atau tidak adanya "pekerjaan" dengan jam kerja, upah, dan target yang ditentukan oleh perusahaan perkebunan. Ketiga, melakukan outsourcing, baik secara resmi maupun tidak resmi. Mayoritas pekerja dalam status ini adalah perempuan.

Jumlah pekerja lepas di perkebunan kelapa sawit, yang tidak memiliki keamanan kerja, sangatlah besar. Ini biasanya terkait dengan pekerjaan pemupukan dan penyemprotan kimia, yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. **Perempuan pekerja lepas menerima upah yang lebih rendah, bekerja tanpa keselamatan dan perlindungan kesehatan yang memadai, harus menyediakan alat kerja mereka sendiri dan tidak mendapatkan cuti haid. Mereka tetap bekerja dengan status sebagai pekerja lepas selama bertahun-tahun,** karena tidak ada kemungkinan untuk beralih ke pekerjaan lain atau kembali ke tempat asal mereka, yang disebabkan karena kondisi kerja tidak memungkinkan untuk menyimpan cukup uang untuk ini.

Pekerja perempuan: Bekerja dengan racun tanpa perlindungan yang layak

Di luar informalisasi hubungan kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja perempuan sangat minim. Di perkebunan kelapa sawit, perempuan selalu memiliki

tugas lebih berbahaya daripada laki-laki karena mereka dipekerjakan untuk bekerja dengan bahan kimia, seperti pupuk, dan menyemprot pestisida. Perusahaan tidak menyediakan alat pelindung atau pelatihan keselamatan. Perempuan tersebut melakukan kegiatan ini tanpa akses ke pemeriksaan medis rutin.

“Saya telah bekerja di sini selama 12 tahun, pekerjaan saya beragam, kadang-kadang [saya] disuruh memupuk sawit, sekarang saya mendeteksi jamur. [Pada] saat proses budidaya, target pekerjaan saya adalah tiga hektar; Saya pernah menghabiskan 25 karung [pupuk] sehari. Saya kemudian pindah ke bagian deteksi jamur karena **paru-paru saya berlubang oleh racun**. Saya tidak tahu penyebabnya, mungkin dari racun pupuk. Memang, saat bekerja, saya diberi masker, pakaian, sarung tangan, tetapi saya terus terpapar pupuk setiap hari. Perusahaan tidak pernah memeriksa kesehatan kami,” kata Nur (38), seorang buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Penyemprotan bahan kimia dilakukan secara manual. Para pekerja membawa sebuah alat penyemprot dengan berat 20 kilogram dan bertanggung jawab untuk menyemprot area tertentu. Penyemprot rata-rata diharuskan untuk menghabiskan 6 hingga 10 kaleng setiap hari sementara perusahaan tidak menyediakan peralatan perlindungan pribadi yang memadai.

Gramoxone, Glyphosate, Rhodamine dan Roundup adalah beberapa bahan kimia yang digunakan dalam proses penyemprotan. Perusahaan tidak memberikan informasi tentang kemungkinan dampak dan bahaya bahan kimia yang digunakan, juga tidak memberikan pelatihan tentang cara mengurangi risiko paparan saat menyemprotkan bahan kimia dan cara mengurangi bahaya terhadap kesehatan. Akibatnya, perempuan yang bekerja sebagai penyemprot rentan terhadap kecelakaan kerja. Mereka sering mengalami penyakit akibat kerja seperti masalah pernapasan, tangan terbakar, pusing, mata kabur, dan bahkan kebutaan. (6)

Pemerintah Indonesia perlu mengatur sistem tenaga kerja yang menempatkan para pekerja sebagai subyek hidup. Pemerintah sebagai pengatur industri perlu mengembangkan prinsip-prinsip kerja yang tepat dan mengevaluasi untuk memastikan bahwa industri minyak sawit memenuhi hak-hak buruh, terutama bagi perempuan. Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memahami implikasi HAM yang mereka timbulkan pada pekerja dan harus mematuhi hukum perburuhan nasional dan internasional. Selain itu, konsumen dan negara pengimpor juga harus memastikan

penolakan mereka terhadap minyak sawit yang diproduksi dalam kondisi kerja yang eksploitatif.

Zidane, *Sawit Watch*, <http://sawitwatch.or.id/>

- (1) <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1480/Indonesia-Fokus-Produksi-CPO-40-Juta-Ton>
- (2) <http://www.mediaindonesia.com/news/read/57550/produksi-cpo-nasional-sasar-target-60-juta-ton-per-tahun/2016-07-22>
- (3) <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/24/ekspor-kelapa-sawit-sumbang-devisa-rp-250-triliun>
- (4) <http://industri.bisnis.com/read/20141015/99/265233/kadin-indonesia-industri-sawit-serap-21-juta-tenaga-kerja>
- (5) Sawit Watch, 2016
- (6) Pada tahun 2015, Perkumpulan Sawit Watch melakukan penelitian tentang kondisi kerja buruh perempuan di dua perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Sawit Watch menemukan dua pekerja perempuan dengan penyakit pernapasan dan tiga lainnya terkena Gramoxone dan cairan Glyphosate, yang mempengaruhi dua orang dengan mata buram dan yang lainnya buta.

Guatemala dan Kolombia: Perempuan Melawan Perkebunan Kelapa Sawit

Kontaminasi terhadap sumber air, kondisi kerja yang menyedihkan, dan pemerasan seksual sebagai imbalan atas pekerjaan, adalah beberapa dari berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit di Guatemala dan Kolombia.

Perkebunan kelapa sawit tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati hutan tropis, tetapi juga masyarakat dan desa-desa yang telah hidup dalam ekonomi tradisional sampai dengan kedatangan agribisnis ini. Dalam banyak kasus, para perempuanlah yang paling giat mempertahankan wilayah mereka.

Guatemala: Pekerjaan eksploitatif dengan imbalan seks

Tepat lima belas tahun yang lalu, wilayah Peten di Guatemala utara adalah hutan hujan. Kemudian datanglah Kelompok HAME, yang dimiliki oleh pemilik tanah Hugo Alberto Molina; dan Petén menjadi ujung tombak ekspansi perkebunan kelapa sawit di negara Suku Maya ini. Perusahaan ini menjadi terkenal ketika, pada tahun 2015, setelah diketahui bahwa perusahaan ini bertanggung jawab langsung atas ekosida (perusakan ekosistem) Sungai La Pasión di kota Sayaxché. Sekami 150 kilometer area dari Sungai La Pasión

terkontaminasi oleh malathion (pestisida yang digunakan untuk membunuh lalat di buah-buahan palem), yang menyebabkan pembunuhan ikan besar-besaran. Meskipun terbukti melakukan pelanggaran hukum, , perusahaan terus beroperasi tanpa pengawasan apa pun.

Di komunitas San Juan de Acul, **kebanyakan orang tetap mandi, memasak, dan bahkan minum dari sumber air ini, meskipun mereka tahu sungai ini telah terkontaminasi.** Tidak perlu kajian ilmiah; tubuh mereka memberi tahu mereka kontaminasi yang terjadi melalui demam, muntah, gatal-gatal dan penyakit kulit dan perut. Tetapi tidak ada sumber air lain, dan **Negara bahkan menolak tangki air yang mereka minta untuk mengambil air hujan.** Sementara hujan semakin langka, yang disebabkan perubahan iklim, yang diperburuk oleh model perkebunan monokultur.

Selain merusak air, bencana ekologis sungai juga menghilangkan sumber makanan utama masyarakat: yaitu ikan. "Sebelumnya, kami akan mendapatkan 50 pon ikan dalam dua hari [di sekitar 22,5 kilo]; hari ini, jika kami beruntung kami bisa mendapatkan sepuluh atau lima belas, dan kadang-kadang bahkan tidak, "kata seorang nelayan; dan dia berkata, **"Kami tidak bisa hidup tanpa air; tidak akan ada kehidupan tanpa air. "**

Satu-satunya alternatif untuk solusi kelaparan adalah mencari penyebabnya, yaitu sawit. Direnggut paksa dari tanah mereka dan sumber makanan mereka, warga San Juan de Acul dipaksa untuk menerima kondisi di perkebunan yang mengingatkan akan masa perbudakan. Kata seorang perempuan petani dari San Juan de Acul: "Mereka bekerja berjam-jam dengan sedikit uang, tanpa jadwal tetap, dan mereka harus membeli sendiri peralatan yang akan digunakan. Tetapi tidak ada tempat lain untuk bekerja. Kalau saja ada sumber pendapatan lain yang tersedia, perusahaan tidak akan mengambil keuntungan dari kebutuhan kami. Tetapi kami harus makan. "Mereka bekerja keras, sembilan atau sepuluh jam selama hari kerja dengan gaji di sekitar 8 dolar AS per hari, jumlah yang berada di bawah upah minimum pedesaan.

Perempuan lah yang menghadapi keadaan terburuk. Mereka bekerja di perkebunan tetapi dalam jenis pekerjaan dengan upah terburuk. Seringkali, **mandor perkebunan memeras mereka, menawarkan mereka bekerja dengan imbalan seks; jika mereka tidak setuju untuk tidur dengan mereka, maka mandor tidak mempekerjakan mereka.** Inilah yang kenyataan yang diceritakan oleh para perempuan dari beberapa komunitas di Petén secara langsung dalam acara *sharing*, serta para perempuan dari

Pantai Selatan, di mana model hutan monokultur tebu merampas komunitas-komunitas pribumi dan petani. Selain itu, mandor yang sama ini sering memperlakukan perempuan dengan penghinaan yang lebih besar daripada mereka memperlakukan rekan-rekan pria mereka. Seperti yang dirangkum oleh seorang pekerja perempuan, "**mereka terus-menerus menghina dan mengancam kami.**"

Dan ada apa setelah kelapa sawit?

"Hanya ada sangat sedikit hutan yang tersisa, dan tidak cukup untuk membersihkan udara. Selama hujan terakhir, airnya hitam; Saya harus membuang setengah ember," kata seorang perempuan petani dari Sayaxché. Dan hujan jarang turun membuat tanah itu sekarat: "**Mereka membunuh tanah itu.** Akar sawit itu seperti buntalan yang tidak membiarkan apa pun tumbuh di atasnya. "Itulah sebabnya mereka takut dengan apa yang akan terjadi ketika perkebunan selesai dan pergi:" **Setelah 25 tahun sawit, tanah ini tidak akan bernilai apa-apa. "**

Faktanya, sebuah penelitian yang dilakukan di Lembah Polochic oleh peneliti Sara Mingorria, dari ICTA (Autonomous University of Barcelona), menunjukkan bahwa — karena besarnya jumlah nutrisi yang dibutuhkan — **monokultur sawit menghilangkan lapisan organik tanah dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur.** Dibutuhkan 25 tahun untuk daerah di mana kelapa sawit ditanam untuk menjadi subur kembali, karena "tanahnya sangat lemah sehingga, tidak peduli berapa banyak pupuk, komponen tanah hilang dan hilang," kata Mingorria. Peneliti menambahkan bahwa perkebunan ini sering disebut "gurun hijau" karena "**jenis pohon ini tidak memungkinkan tumbuh-tumbuhan lain di di sekitarnya**" (1).

Ketika siklus hidup kelapa sawit berakhir, perusahaan mencari wilayah lain di mana investasi mereka akan menguntungkan dengan mengabaikan tanah yang ditinggalkan, sungai yang terkontaminasi, dan desa-desa yang mati - semua ini demi keuntungan komoditas yang diperdagangkan di pasar keuangan (2). Inilah yang terjadi jika tidak dihentikan oleh perlawanan kuat dari masyarakat adat dan petani, dan terutama perlawanan dari para perempuan. "**Perempuan lebih enggan untuk menjual tanah, dan mereka adalah pembela terdepan wilayah ini: di mana perempuan berada di garis depan perlawanan terhadap kelapa sawit, maka gerakan perlawanan itu lebih berhasil**", ini adalah kalimat yang dirangkum oleh seorang anggota organisasi masyarakat, yang telah memilih agar namanya tetap anonim, seperti kebanyakan orang

yang diwawancarai untuk laporan ini. Karena di negara-negara seperti Guatemala dan Kolombia, perempuan yang mempertahankan wilayah dan cara hidup mereka menanggung risiko membayar dengan nyawanya sendiri.

Kolombia: Beban air di atas kepala perempuan

Di daerah pedesaan Maríalabaja — hanya 60 kilometer dari kota turis Cartagena de Indias, Kolombia — komunitas keturunan Afrika, masyarakat adat dan petani mengingat sejarah teror paramiliter baru-baru ini, dari 1998 hingga 2002, yang memindahkan sepertiga dari 50.000 kotamadya itu. warga. Di Montes de María, paramiliter melakukan pembantaian seperti Pembantaian El Salado, di mana, pada Februari 2000, setidaknya 60 orang tewas. Karena ketakutan, orang-orang melarikan diri secara massal, meninggalkan tanah dan rumah mereka; **ketika mereka kembali, seluruh wilayah itu — di mana sampai saat itu, pertanian monokultur dan pertanian tradisional telah hidup bersama — telah ditanami kelapa sawit.** Dan dengan demikian perjuangan untuk bertahan hidup oleh komunitas keturunan Afrika di Maralabaja dimulai.

“Ini adalah tanah dengan anugrah yang melimpah. Setiap hari truk bermuatan ubi, singkong, kacang-kacangan, dan buah-buahan akan berangkat ke Cartagena, bahkan ke Medellín. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, karena tanah itu ditanami kelapa sawit, dan ada hama, dan iklim telah berubah dan tidak ada lagi air yang turun ketika hujan,” keluh Catalina (nama fiktif). Bagi dia dan banyak orang lain di komunitasnya, kelapa sawit telah membawa malapetaka bagi Maríalabaja. Makanan berlimpah pun lenyap, dan yang paling penting, hutan ini mencemari air dari bendungan — yang merupakan satu-satunya air yang bisa diakses desa: **“Air itu terkontaminasi oleh bahan kimia pertanian yang digunakan pada kelapa sawit; itu sebabnya semua perempuan mengalami infeksi vagina; ada banyak penyakit kulit, terutama di kalangan anak-anak, serta penyakit ginjal”**. dengan hanya mandi, orang-orang ini merasakan gatal. Dan tugas mendapatkan air untuk diminum - yang semakin sulit dilakukan – menjadi beban para perempuan, yang harus membawa ember-ember air yang mereka kumpulkan dari daerah-daerah bendungan di mana airnya tidak terlalu keruh.

Berusia di atas tiga puluh tahunan, dan dengan dua anak, Catalina telah menjadi salah satu panutan yang paling dihormati dalam komunitas petani keturunan Afrika ini. Rumahnya adalah tempat pertemuan di mana tetangga datang, mencari bantuan dalam mengisi formulir untuk meminta bantuan pemerintah atau meminta kompensasi —

mengingat bahwa pemerintah Kolombia telah mengakui desa ini sebagai korban konflik internal yang telah menghancurkan negara itu selama 60 tahun. Meskipun demikian, “tidak ada yang menghalangi kami, hanya masalah sepele dan tindakan berbahaya.” Yang dimaksud dengan tindakan berbahaya adalah, dia menjelaskan bahwa **bantuan yang mereka terima hanya bisa menjangkau beberapa orang saja, yang justru berpotensi memecah belah masyarakat;** atau bahwa program-program tertentu memperkenalkan rumah-rumah semen dan batu bata di desa-desa di mana, sampai sekarang, konstruksi sebagian besar rumah warga dibangun dari bahan-bahan asli, seperti lumpur dan pohon. Rumah tradisional ini tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih sejuk.

Catalina menolak gagasan kemajuan yang merendahkan cara hidup leluhur mereka:

“Kami dulu sejahtera, dalam arti bahwa kami hidup dengan baik. Meskipun kami tidak memiliki teknologi, tetapi kami hidup dengan damai “. Catalina membela martabatnya dengan bekerja di tanah sendiri untuk menghasilkan makanan daerah tradisional, dan tidak mengeksport kelapa sawit. Dan dia bertanya-tanya, "Apa yang akan terjadi jika kami petani berhenti memproduksi makanan?"

* Sebagian besar nama pekerja dan aktivis telah dimodifikasi untuk melindungi identitas mereka.

Nazaret Castro, nazaretcastro [at] gmail.com

Carro de Combate Collective telah meneliti dampak kelapa sawit secara mendalam di negara-negara seperti Kolombia, Indonesia, Kamerun, Guatemala dan Ekuador. Penelitian ini didanai melalui crowdfunding dan dengan kolaborasi organisasi, *Entrepueblos*:

<http://carrodecombate.com/>

(1) Las plantaciones de palma aceitera provocan la infertilidad de los suelos tropicales, 2017, Institute of Environmental Science and Technology of the Autonomous University of Barcelona (ICTA-UAB), <http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/las-plantaciones-de-palma-aceitera-provocan-la-infertilidad-de-los-suelos-tropicales-1345667994339.html?noticiaid=1345727879056>

(2) Aceite de palma: una industria modelada por los mercados financieros, 2017, Carro de Combate, <https://www.carrodecombate.com/2017/03/01/aceite-de-palma-una-industria-modelada-por-los-mercados-financieros/>

Kamerun: Para Perempuan Setempat Dikepung oleh Militer Penjaga Perkebunan Kelapa Sawit SOCAPALM

Seorang perempuan dari desa Mbonjo 1, Kamerun, yang telah menyaksikan dampak perkebunan kelapa sawit industri dan kehadiran aparat militer, menyerukan solidaritas internasional dan perlindungan hak untuk hidup dan kebebasan mereka.

Perusahaan SOCAPALM, bagian dari kelompok agri-pangan multinasional SOCFIN (1), telah mempekerjakan penjaga keamanan untuk perkebunan kelapa sawitnya di Dibombari di daerah barat daya negara Kamerun untuk mencegah warga lokal memanen biji sawit. Perusahaan keamanan tersebut pada awalnya ditugaskan untuk mengawasi perkebunan. Namun, **warga setempat menyaksikan sendiri bagaimana kehadiran para tentara ini telah mengintervensi kehidupan mereka seperti di zona perang.**

Seorang perempuan yang tinggal di dekat perkebunan memberikan kesaksiannya tentang bagaimana para perempuan mengalami penganiayaan dari para personel militer di depan mata para pemimpin desa mereka.

Masyarakat menjadi tahanan di desa mereka sendiri

"Setiap kali kami ingin mengunci rumah kami, kami melihat orang-orang bersenjata di depan pintu rumah kami: apa yang sedang mereka cari?"

"Orang-orang bersenjata ada di mana-mana"

"Di mana-mana orang diserang dan dipukuli"

Begitulah kehidupan sehari-hari di desa Mbonjo 1 menurut para perempuan yang tinggal di sebelah perkebunan kelapa sawit SOCAPALM di Dibombari, Kamerun. Situasi ini membuat sekitar 20 perempuan berkumpul pada tanggal 29 Januari 2018 dan mengeluh kepada kepala komunitas mereka bahwa mereka muak dengan kehadiran penjaga bersenjata dan tentara di kota mereka serta perkebunan yang mengelilingi kota mereka.

"Bukan hanya SOCAPALM yang mengambil alih tanah kami; ada tentara bersenjata di mana-mana. "

Para prajurit telah berada di kota kami sejak 8 Desember 2017. Para perempuan di Mbonjo 1 memahami bahwa tentara-tentara ini ditugaskan untuk mengawasi perkebunan

SOCAPALM, tetapi kami tidak ingin para prajurit ini berada di belakang rumah kami dan bahkan di dalam dapur kami. **Pasukan keamanan telah memukuli perempuan dan pemuda, mengancam mereka tentang biji sawit, dan lebih parah lagi, mereka juga berlama-lama di belakang dapur perempuan.** Tidak ada privasi lagi di Mbonjo 1 sejak kehadiran militer. Alih-alih menjaga biji sawit di perkebunan SOCAPALM, para prajurit sering menghabiskan waktu mereka di kota, mengganggu para perempuan dan pemuda. Mereka tidak pernah memberikan bukti bahwa mereka berwenang untuk menggeledah rumah warga. Mereka mendobrak pintu bahkan menyerang warga setempat. Kehadiran mereka membuat hidup di kota sangat tegang, karena para prajurit ini menyalahgunakan kekuasaan mereka.

"Ketika kami tidur di malam hari, para prajurit memasuki rumah kami. Sejak kapan ada pohon sawit di rumah kami? Kebun sawit berada di lereng bukit, bukan di dalam rumah kami. Itu sebabnya kami berkumpul di depan rumah kepala desa, tapi beliau malah mengusir kami. Beliau bahkan tidak menawarkan kami sambutan hangat. **Para tentara ada di mana-mana, di semua tempat.** Apa yang harus kami lakukan di Mbonjo 1? Ketika kami ingin mengunci rumah kami tetapi para prajurit ada di sana, bersenjata. Apa yang mereka inginkan dari kami para warga? "

Saat ini para pertanyaan-pertanyaan para perempuan di Mbonjo 1 tersebut masih belum terjawab sehubungan dengan kehadiran militer. Mereka tidak berdaya, tanpa solusi atau informasi tentang apa yang terjadi pada mereka.

Tindakan tentara sering terjadi tanpa izin resmi yang memberi mereka izin untuk menggeledah dan menyusup ke ruang hidup kami. Kami menginginkan dan bercita-cita untuk lingkungan dan kondisi kehidupan yang tanpa tekanan. Kami tidak memilih untuk lahir di Mbonjo 1- itu hanya nasib buruk kami, seolah-olah seperti kutukan. Namun kami masih percaya kami bisa mengubah situasi ini dan kami bertekad untuk melakukannya. Itu sebabnya kami pergi menemui kepala desa.

Para tentara merasa mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan

Sebagian besar perempuan di komunitas ini takut terhadap militer. Kami tahu bahwa akan sulit bagi kami untuk memenangkan pertarungan kami melawan orang-orang berseragam ini. Dan mereka sangat menyadari bahwa tindakan kekerasan apa pun yang mereka lakukan terhadap kami, anak-anak kami dan suami kami, mereka tidak akan dihukum.

Mereka bahkan tidak khawatir walaupun mereka akan segera ditransfer ke tempat lain dan akan terus terlibat dalam perilaku ini karena mereka mendapat **dukungan penuh dari perusahaan.**

Para perempuan ini menyadari betapa besarnya kekuatan perusahaan setelah putusan pengadilan yang mendukung perempuan yang dilecehkan tidak pernah dilaksanakan. Contoh kasus yang paling terkenal adalah kasus seorang perempuan yang kehilangan bayinya ketika dia mengalami keguguran setelah penjaga SOCAPALM memukulinya. Kejadian ini terjadi enam tahun lalu. Di pengadilan Mbanga, putusan pengadilan berpihak kepada perempuan itu, tetapi SOCAPALM mengajukan banding dan kasus ini berlanjut di pengadilan di Douala, ibukota perekonomian Kamerun. Sidang berikutnya adalah pada 23 Maret 2018.

Kepala desa pasif

"Kami tidak datang untuk berperang. Kami datang untuk perdamaian. Tapi sudah ada perang antara kepala dan kami, para perempuan Mbonjo 1. "

"Kami ingin bantuan dari kepala desa sebagai ayah kami dan itulah sebabnya kami datang untuk menemui ayah kami; kami ingin kedamaian. Tapi beliau malah mengusir kami. "

Perilaku ini mengejutkan warga setempat. Para perempuan berusaha menemui kepala desa untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Sayangnya, beliau tidak menerimanya. Kekecewaan lain yang harus dihadapi para perempuan ini adalah mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa atau bagaimana melanjutkan perjuangan mereka.

Kami sangat berharap kepala desa mendengarkan para perempuan dan membela kami. Misinya seharusnya adalah untuk melindungi bangsanya. Tetapi beliau bahkan tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan. Bagaimana mungkin seorang kepala suku melihat kedatangan 20 perempuan di depan rumahnya dan tidak mencoba memahami alasan kehadiran mereka?

Semakin banyak jumlah kepala desa yang mendapat manfaat dari bantuan SOCAPALM. Sebagai balasannya, para pemimpin ini mengambil tindakan yang merugikan warga setempat. Sikap mereka membuat kami percaya bahwa para pemimpin tidak berada di

pihak kami. Mereka berkolusi dengan perusahaan dan membiarkan warga mereka mati. Perilaku egois ini juga menghasilkan kesenjangan yang lebih besar antara warga lokal dan perusahaan, karena kepala desa yang seharusnya bertindak sebagai perantara tidak mau menerima atau mengkomunikasikan keluhan warga mereka, untuk menemukan solusi yang valid bagi kedua belah pihak untuk terwujudnya perdamaian dan perkembangan yang berkelanjutan.

Tindakan ini menggarisbawahi rasa tidak nyaman yang mendalam yang telah ditimbulkan oleh SOCAPALM di komunitas setempat. **Perempuan-perempuan ini menjadi tahanan di desa mereka sendiri, di mana mereka terus-menerus dirundung ketakutan.**

Perusahaan merampas dan mengeksploitasi tanah kami. Pihak SOCAPALM harus menghormati privasi kami di rumah kami sendiri. Kami lelah dengan semua penyalahgunaan kekuasaan oleh pasukan keamanan, yang mengganggu kami dan anggota keluarga kami. Kami merasa sendirian dan ditinggalkan. Kami berjuang semampu kami untuk membuat lingkungan kami layak huni. **Kami menyerukan solidaritas hingga melampaui batas luar desa kami. Ini adalah seruan peringatan yang kami angkat untuk melindungi hak kami untuk hidup dan kebebasan kami. Meskipun kami harus dipaksa menderita kelaparan dan dikutuk menjadi miskin, kami tidak menerima bahwa mereka juga bahkan mengambil kebebasan kami. Hanya itu yang tersisa.**

Marie Noël ETONDE

Presiden dari the Women of the National Association of Peasants and Local residents in Cameroon (SYNAPARCAM – Synergie Nationale des Paysans et Riverains du Cameroun)

*** Baca lebih lanjut tentang dampak SOCAPALM di desa Mbonjo: "Perampasan tanah di desa Mbonjo, Kamerun menggusur populasi dan tidak menghormati tanah pemakaman leluhur," artikel yang ditulis oleh Jaff Bamenjo, koordinator untuk RELUFA Joining Hands Cameroon: <https://www.presbyterianmission.org/together-justice/2017/12/06/palm-plantation-invades-ancestral-lands/>*

(1) Pada tahun 1968, pemerintah Kamerun membentuk SOCAPALM, perusahaan minyak sawit nasional. Perusahaan ini diprivatisasi pada tahun 2000 dan dijual ke SOCFIN Group, sebuah perusahaan pertanian multinasional yang dikendalikan oleh keluarga Belgia Fabri (50,2% saham) dan grup Prancis Bolloré (39% saham). Untuk mempelajari lebih lanjut

tentang dampak perkebunan SOCFIN di Afrika, silakan lihat <https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/socfins-plantations-in-africa-many-places-of-violence-and-destruction/>

India: Perkebunan Mencabut Perempuan dari Hutan Adat Mereka

Program negara India untuk mengkompensasi kerusakan hutan untuk proyek-proyek pembangunan adalah secara rutin mendirikan perkebunan pohon monokultur di komunitas bersama. Perempuan, yang sebagian besar terdampak, melakukan perlawanan.

Selama 30 tahun terakhir, Uma Bai Netam, seorang perempuan suku Gond, telah menanam millet bersama suaminya di lahan hutan seluas 5 ekar atau sekitar dua hektar di negara bagian Chhattisgarh, India. Bertahun-tahun penanaman dan mendiami tanah ini tidak serta merta menjadikannya pemilik sah dari tanah tersebut. Sampai diberlakukannya Undang-Undang Penjadwalan Suku-suku dan Penghuni Hutan Tradisional Lainnya (Pengakuan Hak Hutan), tahun 2006 (FRA). FRA, untuk pertama kalinya, berupaya untuk memperbaiki 'ketidakadilan sejarah' terhadap komunitas penghuni hutan dengan mengakui hak adat mereka untuk memiliki, mengakses, menggunakan, dan mengelola hutan. **FRA mengakui perempuan sebagai pemegang hak yang sama atas sumber daya alam, dengan mengakui mereka sebagai pemegang hak bersama atas sebidang tanah individual, dan sebagai anggota yang setara dari badan pembuat keputusan inti pada Gram Sabha (majelis desa).**

Akan tetapi jika Uma Bai mengira ini berarti dia akhirnya bisa hidup dan bekerja di tanahnya dengan bermartabat, dia salah besar. Bersama dengan suaminya, Hak Sumber Daya Hutan Individual (IFR) lebih dari 2,5 ekar (sekitar satu hektar) secara resmi diakui setelah 2010 (1), tetapi 2,5 hektar lainnya segera diambil alih oleh Departemen Kehutanan negara bagian untuk menumbuhkan perkebunan jati. Perkebunan jati ini menyebar lebih dari 63 hektar di Sumber Daya Hutan Rakyat (CFR) di desa nya dan desa-desa tetangga. Setelah berjuang melawan kemiskinan, ia harus kehilangan setengah dari tanah yang bisa ditanami. Situasi ini membuat Uma Bai tidak bisa menanam millet seperti sebelumnya.

Bagi Uma Bai, ini berarti kerugian besar sejumlah Rs.10-11.000 per tahun (sekitar 160 dolar AS).

Perkebunan industri untuk mengkompensasi kerusakan hutan di tempat lain?

Perkebunan jati yang meliputi tanah milik Uma Bai adalah bagian dari program hutan India yang disebut Compensatory Afforestation (CA), yang diperkenalkan sebagai langkah untuk 'regenerasi' hutan yang hilang dikarenakan proyek pembangunan di India. Departemen Kehutanan negara bagian mendirikan perkebunan di lokasi lain untuk mengkompensasi pengalihan (dan perusakan) hutan untuk proyek-proyek pembangunan, seperti pertambangan, irigasi dan infrastruktur. Pada tahun 2002, Otoritas Manajemen dan Perencanaan Penghijauan Kompensasi ad-hoc dibentuk atas perintah Mahkamah Agung India untuk mengelola dana CA yang dikumpulkan dari "agen-agen pengguna lahan" atau perusahaan, dalam pertukaran hutan yang dialihkan untuk proyek. Menurut catatan pemerintah sendiri, pada tahun 2016, sejumlah uang lebih dari Rs. 40.000 crores (sekitar 6,2 miliar dolar AS) telah berhasil dikumpulkan dari 'agen pengguna' tersebut (2). Pada tahun 2016, Pemerintah India memberlakukan Compensatory Afforestation Fund Act (CAF Act) untuk melembagakan mekanisme formal untuk pencairan dana ini, yang saat ini berada pada Rs.50.000 crores (sekitar 7,8 miliar dolar AS), dan jumlah ini terus bertambah.

Undang-Undang CAF mentransfer sejumlah besar uang ini ke birokrasi hutan pencari-sewa era kolonial, tanpa mengikutsertakan masyarakat dan Gram Sabha dalam pengambilan keputusan. Sentralisasi tata kelola hutan India di tangan Departemen Kehutanan memiliki andil dalam merampas tanah masyarakat yang tinggal di hutan. Sementara itu FRA diberlakukan untuk mematahkan cengkeraman birokrasi hutan dengan memberikan hak atas CFR dan memberdayakan Gram Sabhas untuk memerintah hutan, namun janji untuk tata kelola hutan yang demokratis masih belum tercapai, dengan hanya 3 persen dari potensi CFR yang telah diakui secara formal. dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Di Chhattisgarh, tempat tinggal Uma Bai, tidak ada CFR yang diakui sama sekali. Bersama dengan pejabat pemerintah dan lobi pertambangan, perlawanan terkuat terhadap implementasi FRA berasal dari birokrasi hutan yang sama.

Dengan memusatkan kembali peran birokrasi hutan dalam tata kelola hutan, sekarang dengan akses ke dana dalam jumlah besar ini, **UU CAF memiliki potensi untuk mengerem terhadap bahkan keuntungan kecil dalam pengakuan hak-hak masyarakat penghuni hutan atas hutan. pemerintahan di bawah FRA.** Departemen kehutanan telah secara paksa mengambil alih lahan CFR dan IFR untuk membangun perkebunan pohon kompensasi. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh CFR-Learning & Advocacy (3), sebuah kelompok pembela hak-hak hutan, di negara bagian Odisha yang kaya hutan, Jharkhand, Maharashtra dan Chhattisgarh, **perkebunan CA secara didirikan di lahan tanah yang bisa ditanami milik masyarakat, termasuk situs-situs yang memiliki nilai-nilai budaya. Tanah masyarakat kemudian dipagari, kadang-kadang dengan pagar kawat dan lainnya dengan penjaga bersenjata, untuk mencegah akses warga ke sumber daya hutan.**

Hutan Mono-Kultur yang yang merugikan perempuan

Bagi perempuan, yang memiliki hubungan yang lebih dekat dan ketergantungan kepada tanah dan hutan, situasi ini telah menciptakan atmosfer lingkungan ketakutan dan pelecehan. Sebagai pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian dan pendapatan di dalam rumah tangga melalui pengumpulan hasil hutan kecil, perempuan sekarang menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, bahan bakar, produk hutan non-kayu, tanaman obat dan pendapatan sehari-hari.

Di beberapa daerah, Departemen Kehutanan telah menebangi hutan alam yang lebat dan menggantikannya dengan perkebunan komersial monokultur. Kajian & Advokasi CFR menemukan bahwa dari 2.548 perkebunan CA di 10 negara bagian, 60 persen adalah hutan monokultur dan komersial, dengan kayu jati dan kayu putih yang ditanam bersamaan, yaitu lebih dari 25 persen dari pohon yang ditanam di lahan tersebut. Hutan ini menimbulkan malapetaka bagi komunitas lokal dan keanekaragaman alami spesies tanaman dan hewan di hutan. Sebagai contoh, perkebunan jati telah menghancurkan habitat Kutia Kondhs, Kelompok Suku Rentan (PVTG) yang tinggal di negara bagian Odisha, India timur, dan telah membawa keranjang makanan mereka dari hampir 80 jenis millet menjadi 25. Pergantian, dan perampasan dari akses dan penggunaan hutan telah menyebabkan migrasi dan kesusahan dalam masyarakat untuk pertama kalinya.

Perubahan yang terjadi dalam tatanan budaya dan cara hidup mereka ini tidak dapat diubah.

Di berbagai desa yang berbeda, **perempuan tetap menentang upaya perampasan dan pelecehan lahan sebagai akibat dari perkebunan ini, dan menentang melalui cara-cara hukum dan politik.** Di kantong-kantong desa Jharkhand dan Odisha, perkebunan telah menjadi titik temu untuk pembentukan Komite Hak Hutan yang diwajibkan oleh Gram Sabha, sering kali atas inisiatif perempuan. Di Chhattisgarh dan Jharkhand, masyarakat telah mengorganisir diri mereka dalam kelompok-kelompok untuk menyebarkan kesadaran tentang hak-hak Sumber Daya Hutan Komunitas mereka. Mereka melakukan protes, menghentikan paksa perkebunan-perkebunan ini dan mengadukannya ke pejabat pemerintah. Oposisi terhadap perkebunan paksa dan destruktif ini telah dimentahkan oleh Departemen Kehutanan dengan kekerasan terhadap pria dan perempuan, seperti dengan Kutia Kondhs, dan dengan menimpakan kasus-kasus pelanggaran hutan terhadap suku-suku dan PVTG.

Karena kehidupan dan mata pencaharian perempuan penghuni hutan berubah sedemikian drastis yang disebabkan perkebunan CA, ketidakamanan kepemilikan tanah mereka sering mencegah mereka untuk bersuara dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan mereka atas Sumber Daya Hutan Rakyat, Sumber Daya Hutan Individual, dan Sumber Daya Komunitas yang diakui oleh FRA ditolak oleh otoritas pemerintah, dan terus ditangguhkan tahun demi tahun, atau latihan mereka ditolak. Departemen Kehutanan tidak melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Gram Sabha untuk meminta persetujuan mereka sebelum mendirikan perkebunan ini. Kadang-kadang persetujuan diperoleh secara paksa melalui kekerasan dan pelecehan. Masyarakat yang sudah kehilangan hutan untuk proyek-proyek pembangunan terpukul kedua kalinya ketika tanah mereka diambil untuk perkebunan komersial. dalam skenario ini, **ruang bagi perempuan untuk menegaskan hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dilemahkan oleh faktor kelembagaan dan budaya.**

Bagaimanapun, perkebunan CA tidak baik untuk lingkungan atau untuk masyarakat. Hutan, setelah dirusak, tidak dapat 'ditanam kembali'. Bukti dari berbagai lokasi di seluruh

dunia adalah kesaksian bahwa hanya dengan penguasaan yang terjamin bagi warga masyarakat, khususnya perempuan di dalamnya, hutan dapat dilestarikan dan dilindungi.

Sebagai pengguna utama hutan, pemegang dan wadah pemikiran pengetahuan tradisional, perempuan adalah inti dan tulang punggung dalam proses konservasi sumber daya. Di India ada ribuan kelompok perlindungan hutan, dipimpin dan dikelola terutama oleh perempuan, yang telah berhasil meningkatkan tutupan hutan, aliran regenerasi, membangun kembali habitat satwa liar yang hancur, dan mengendalikan perburuan liar dan penyelundupan ilegal. Namun, peran mereka dalam konservasi dan restorasi hutan hampir tidak pernah diakui dalam wacana resmi tentang perlindungan dan restorasi hutan.

Pesannya jelas: konservasi dan regenerasi hutan membutuhkan pengelolaan berbasis masyarakat bukan perkebunan komersial monokultur yang dikendalikan oleh Departemen Kehutanan, dengan perempuan menjadi pusat perhatian dalam proses tersebut. Dengan mengamankan hak-hak perempuan atas hutan, FRA memberikan jalan dan ruang untuk membawa pengetahuan, pengalaman, dan otoritas perempuan dalam tata kelola hutan ke posisi terdepan. Ruang ini membutuhkan intervensi aktif untuk mengatasi hambatan di tingkat kebijakan, kelembagaan dan budaya yang memarginalkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dubey. Sanghamitra and Chitkara. Radhika

(With tambahan dari Tushar Dash and Soma K.P)

Anggota dari CFR- Learning & Advocacy

(Sanghamitra Dubey terkait dengan Vasundhara and adalah anggota dari national CFR-learning and advocacy process sanghamitra@vasundharaorissa.org/sanghamitradubeyikk@gmail.com RadhikaChitakara adalah seorang peneliti independen and anggota dari national CFR-learning and advocacy process rchitkara@llm17.law.harvard.edu)

(1) FRA secara luas mengidentifikasi tiga jenis hak sumber daya: Hak Sumber Daya Hutan Masyarakat (CFR), yang memberikan hak-hak tata kelola dan kepemilikan atas batas-batas hutan adat dalam Gram Sabha (majelis desa); Hak Sumber Daya Hutan Individual (IFR) mencakup tanah yang ditempati, dihuni atau diolah oleh rumah tangga; dan Hak Sumberdaya Komunitas (CR) atas hasil hutan minor, lahan penggembalaan, kekayaan intelektual dll.

Lihat informasi lebih lanjut tentang UU Hak Hutan dalam artikel buletin WRM Agustus 2014:

<http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/india-forest-struggles-at-the-crossroads/>

(2) Lihat lebih lanjut tentang the Compensatory Afforestation Fund di India pada artikel bulletin WRM nulan A2015: <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/deforestation-funds-more-plantations-the->

[new-compensatory-afforestation-fund-bill-in-india/](http://www.wrm.org.uy/actions-and-campaigns/india-support-forest-dependent-communities-against-plantations-expansion/) ; dan aksi siaga terhadap UU CAF dari bulan September 2016 di tautan : <http://www.wrm.org.uy/actions-and-campaigns/india-support-forest-dependent-communities-against-plantations-expansion/>

(3) Hak belajar dan advokasi Komunitas Hutan (www.cfria.org.in)

Liberia: Perempuan Angkat Suara dalam Proses Pengambilan Keputusan

Suara-suara dan kisah-kisah dari para perempuan yang bergantung pada hutan sering kali ditolak, tidak terdengar atau bahkan dibungkam, agar lebih mudah bagi perusahaan untuk mengambil tanah masyarakat. Tetapi apa yang terjadi ketika para perempuan mulai mengangkat suara mereka?

Suara-suara dan kisah-kisah para perempuan yang bergantung pada hutan sering kali ditolak, tidak terdengar atau dibungkam. **Perempuan sering kali ditolak untuk peran aktifnya dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, terutama ketika menyangkut keputusan seputar masalah pertanian.** Mereka tidak ditanggapi dengan serius, tetapi mereka lah yang melakukan sebagian besar kegiatan yang berhubungan dengan pertanian yang bergantung pada hutan untuk mengumpulkan makanan, obat-obatan dan air untuk keluarga dan masyarakat mereka. Pengabaian ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat lazim.

Tidak adanya suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan telah menimbulkan protes, konflik dan kerusakan di sekitar lahan konsesi skala besar, terutama untuk kelapa sawit. Para perempuan berkumpul dan mulai menuntut perusahaan konsesi meninggalkan tanah mereka. **Menolak partisipasi perempuan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan telah menjadikan perusahaan konsesi lebih mudah untuk mengambil alih lahan masyarakat.**

Platform untuk menyatukan suara para perempuan

Platform Perempuan Sumberdaya Alam (NRWP) dibentuk pada 2010 dengan nama Platform Perempuan Hutan Liberia. **Platform ini didirikan saat kami semakin**

menyadari pentingnya bersuara: hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk berpartisipasi, untuk menyetujui atau tidak setuju; untuk hidup dan berpartisipasi, untuk menafsirkan dan menceritakan. Perempuan yang bergantung pada hutan dari 15 kabupaten Liberia berkumpul dan membentuk Platform sebagai cara untuk mengorganisir melawan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan elit berbasis desa - yang dipanggil ke pertemuan pengambilan keputusan atas nama perempuan yang bergantung pada hutan-, dengan kekerasan dan pelecehan yang dipaksakan oleh pengembangan lahan konsesi skala besar serta tantangan yang tak henti-hentinya dalam menghadapi perubahan iklim.

Pada tahun 2012, seiring kemajuan yang dibuat oleh Platform Perempuan Hutan Liberia, perempuan lain - seperti perempuan yang bermigrasi dari komunitas pedesaan ke daerah perkotaan untuk mencari mata pencaharian sebagai pedagang, penambang pasir, penghancur batu atau mereka yang terlibat dalam produksi arang serta perempuan yang terlibat dengan Gogbachop (bisnis luar kota) - merasa perlu untuk bergabung dengan Platform. Argumen mereka adalah bahwa mereka juga mengalami dari masalah dan tantangan yang sama yang dihadapi perempuan yang bergantung pada hutan; mereka adalah, para perempuan yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka melalui pengumpulan tanaman obat, makanan, jamur, madu, rempah-rempah negara, kayu, minyak kelapa sawit, dan alu sebagai alat penumbuk dll. Setelah beberapa konsultasi, selama dua tahun Aliansi untuk Demokrasi Pedesaan, pada pertemuan yang diadakan pada tahun 2012 di Kota Kun, Grand Cape Mount County, Liberia, Platform Perempuan Hutan Liberia membuka keanggotaannya dan mengubah namanya menjadi nama yang lebih inklusif: yaitu The Natural Resource Women Platform (Platform Wanita Sumber Daya Alam)

Selama proses pembentukan Platform, para perempuan menyetujui tujuan dan sasaran yang akan mengatur dan membimbing kegiatannya, meliputi bagaimana menciptakan hubungan antara semua perempuan yang bergantung pada sumber daya alam berdasarkan rasa hormat satu sama lain dan kepedulian yang tinggi terhadap ide satu sama lain; untuk mengumpulkan dan mencatat pengetahuan perempuan yang bergantung pada sumber daya alam tentang kepemilikan tanah dan hak mereka atas hutan; mendukung suara-suara perempuan ini terhadap penyalahgunaan sumber daya komunitas mereka, termasuk keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan,

melalui organisasi mereka dan kegiatan pembelajaran untuk mengendalikan dan menjaga sumber daya mereka; mempromosikan lebih banyak peluang dan hak bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam berbagi manfaat dari sumber daya mereka serta untuk menemukan cara mudah bagi mereka untuk sampai ke pasar untuk menjual produk mereka; menyediakan ruang di mana mereka dapat berbagi ide dan pengalaman dalam pencarian mereka untuk keadilan; memperjuangkan hak yang sama dan kepemilikan perempuan atas sumber daya alam dan hutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka yang buruk; berusaha menghapus perasaan memandang rendah diri mereka sendiri; dan menunjukkan peran dan pentingnya sumber daya alam dalam sejarah masyarakat di Liberia.

Masalah kekuatan

Mencegah perempuan untuk bersuara adalah cara untuk memaksakan pada mereka keputusan yang secara fundamental akan mengatur kehidupan perempuan, termasuk melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kemauan, minat, kesehatan, kepercayaan, dan / atau kelangsungan hidup mereka. Jika suara perempuan didengar dalam keputusan seputar penggunaan dan kontrol atas tanah dan hutan, mereka dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan dengan lebih baik yang dapat membantu mengurangi beberapa tantangan mata pencaharian di masyarakat.

Advokasi hak asasi manusia telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir di negara Liberia dan para pembela hak asasi manusia berjuang untuk memperkuat suara perempuan yang terkena dampak kekerasan. Pembebasan lahan berskala besar untuk pertambangan, pertanian, dan kehutanan merusak hak-hak dasar masyarakat lokal, termasuk hak mereka untuk hidup dan hak tanah ulayat. **Isu-isu partisipasi penuh dan kesetaraan perempuan dalam kehidupan publik juga harus menjamin non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta partisipasi penuh dan setara dalam pengambilan keputusan dan akses ke kekuasaan di semua tingkatan.** Tidak adanya partisipasi para perempuan dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan tantangan berat yang dihadapi perempuan untuk mencari penghidupan bagi keluarga dan komunitas mereka di tempat di mana pengembangan lahan berskala besar merambah dan merampas lahan masyarakat,

sementara kekerasan yang terjadi ketika masyarakat memprotes perambahan besar seperti itu semakin meningkat. Situasi ini seperti hidup dengan beban kematian.

Contoh kasus, seorang perempuan pembela hak asasi manusia menjadi korban penangkapan. Dia dipukuli dan disiksa karena berbicara menentang konsesi besar yang merampas tanah adat dan hutannya di mana ia menggantungkan hidupnya. Sayangnya keputusan yang dibuat mengabaikan gagasannya - dan gagasan para perempuan lain - tentang pentingnya penggunaan lahan dan hutan untuk mata pencaharian mereka dan tantangan / masalah yang akan mereka hadapi ketika tanah dan hutan tidak ada lagi, tidak pernah dipertimbangkan, diperburuk lagi tidak ada alternatif mata pencaharian yang bisa menggantikan tanah dan hutan.

Liberia telah menandatangani instrumen internasional utama yang mengakui dan menjamin persamaan hak bagi perempuan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan khususnya Konvensi Penghapusan dari semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Jelaslah bahwa partisipasi penuh dan setara perempuan dalam pengambilan keputusan harus mengatur panggung. Seringkali, suara-suara perempuan telah terbukti sebagai suara perubahan yang dinamis, mendorong setiap orang untuk terlibat untuk mengklaim hak-hak mereka, memperkuat komunitas mereka dan melindungi hutan dan tanah mereka. Menolak partisipasi perempuan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan telah mempermudah perusahaan perkebunan untuk mengambil kendali atas tanah masyarakat.

Berikut adalah suara seorang pembela hak asasi perempuan dari salah satu perkebunan kelapa sawit Golden Veroleum Liberia (GVL):

“Kakek saya lahir di sini dan saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun sampai sekarang. Selama ini, kami telah menikmati tanah air kami sampai Golden Veroleum datang. Ketika mereka datang, kami tidak menolak mereka. Kami diberitahu bahwa perusahaan membutuhkan lahan untuk pembibitan kelapa sawit. Kemudian, kami akhirnya mengetahui bahwa mereka ada di sini untuk menanam di semua tanah kami dan mereka memberi tahu kami bahwa tanah itu bukan milik kami melainkan milik pemerintah. Di

mana lagi kami akan tinggal, di langit? Kami tidak setuju dengan operasi mereka lagi. Mereka telah menipu kami. Biarkan mereka pergi. Kami tidak ingin mereka ada di sini ”.

Menghalangi perempuan bersuara dan berpendapat yang mereka inginkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat mana pun adalah bentuk kekerasan terhadap mereka. Perempuan harus membuat suara mereka benar-benar didengar!

Platform Perempuan Sumberdaya Alam (NRWP), [nrwomenplatform \[at\] gmail.com](mailto:nrwomenplatform@gmail.com)

Indonesia: Perkebunan kelapa sawit dan jejak kekerasan terhadap perempuan

Para perempuan menderita berbagai jenis kekerasan yang dilakukan oleh majikan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pasukan keamanan, polisi dan militer, yang kemudian memperkuat patriarki serta peran serta dalam hubungan mereka dengan masyarakat pada umumnya.

Atas nama pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia secara agresif mempromosikan minyak sawit sebagai komoditas untuk bersaing di pasar global. Promosi ini, bagaimanapun, mencakup fakta bahwa perkebunan kelapa sawit tidak hanya menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan, tetapi juga pelanggaran hukum dan hak asasi manusia serta ketidaksetaraan dalam rezim penguasaan lahan. Semua ini bermuara pada pelanggaran, diskriminasi, kemiskinan, perampasan tanah, hilangnya sistem sosial dan budaya, konflik sosial dan banyak lagi.

Mengapa perkebunan kelapa sawit khususnya berdampak pada perempuan?

Perempuan menghadapi banyak ketidakadilan yang terkait dengan peran gender, posisi dan hubungan mereka dengan orang lain dalam keluarga, komunitas, negara dan masyarakat pada umumnya. Ketidakadilan ini meningkat seiring meningkatnya pasar neoliberal yang agresif dan aliran modal yang didasarkan pada produksi kotor,

keserakahan, dan ketidaktahuan tentang keberlanjutan sosial-lingkungan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, perkebunan kelapa sawit industri di Indonesia menyebabkan konflik di tingkat masyarakat sambil mengabaikan pengalaman perempuan serta peran penting mereka dalam reproduksi sosial. Sehingga akhirnya, perempuan terpapar pada kondisi terendah, termiskin, terpinggirkan dan terabaikan.

Masalah **kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan hampir tidak pernah dibahas dalam industri minyak kelapa sawit atau oleh para aktor terkait lainnya.** Faktanya, kenyataan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit sebagian besar dihilangkan dari kisah perusahaan dan pemerintah yang diceritakan tentang perkebunan kelapa sawit industri. Dalam sebagian besar acara yang membahas industri ekstraktif, seperti kelapa sawit, industri pulp atau penebangan, kisah perempuan justru tidak ada. Seringkali, kebijakan pemerintah hanya terfokus pada perluasan produksi dan permintaan, antara lain meningkatkan manfaat perusahaan. Kebijakan-kebijakan sama sekali tidak tertarik untuk menginformasikan dampak yang dibawa oleh industri ini. Sebaliknya, perluasan hutan monokultur ini hanya memperburuk situasi perempuan dan masyarakat secara umum, dan pencemaran sungai dan sumber air hanya menjadi salah satu dari banyak dampak yang ditimbulkannya. Para pekerja perempuan sepenuhnya menyadari hal ini; namun, mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga keluarga mereka tetap hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia seperti WALHI, RMI, Bina Desa, Lembaga Dayakologi dan Debt Watch, menemukan berbagai lapisan kekerasan yang dialami perempuan di sektor sumber daya alam. (1) Dengan menggunakan analisis ekologi politik feminis, penelitian ini menyoroiti bagaimana kekerasan terhadap **perempuan adalah sebuah kenyataan di mana pun perkebunan kelapa sawit industri di Indonesia didirikan.**

Perempuan yang mengalami pelecehan struktural

Dengan kedatangan perkebunan kelapa sawit skala besar, perempuan kehilangan akses dan kontrol atas tanah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menjadi buruh di

perkebunan. Dalam banyak kasus, perempuan yang bekerja di perkebunan ini memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan hukum. Mereka sebagian besar harus bekerja menyemprotkan pupuk dan pestisida, yang berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Dalam sebuah studi tentang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, banyak perempuan menyatakan mereka tidak tahu bahwa tanah mereka atau tanah keluarga sekarang ada di tangan perusahaan. Kurangnya informasi ini juga diperkuat oleh situasi umum di Indonesia, di mana laki-lakilah yang umumnya memiliki tanah.

Karena itu, **perusahaan menganggap bahwa penting untuk melibatkan hanya laki-laki dalam pertemuan sosialisasi.** Selain banyak strategi intimidasi yang digunakan oleh perusahaan, manisnya janji atas manfaat jika keluarga mendaftar dalam skema 'plasma' (skema petani kecil yang sangat umum di Indonesia dan telah menjebak banyak keluarga dalam hutang), menjadi pekerja perusahaan di tanah mereka sendiri, telah menyebabkan banyak keluarga pada akhirnya kehilangan tanah mereka. Tidak ada PERSETUJUAN ATAS DASARA INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (Padiatapa/FPIC) yang dilakukan dengan masyarakat, terutama dengan perempuan yang akan mengalami dampak berat dan spesifik ketika perkebunan kelapa sawit, yang tamak akan tanah dan air, memasuki desa mereka. Di banyak tempat, beban mencari air ada di pundak perempuan; karenanya, ketika ada krisis air akibat kekeringan atau polusi, beban kerja perempuan semakin besar.

Bagi perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar area perkebunan, menjadi "brondol" adalah cara bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. "Brondol," adalah perempuan yang mengambil buah kelapa sawit yang tersisa di tanah. Dari pagi hingga sore, mereka berjalan jauh untuk mencapai perkebunan kelapa sawit, dengan risiko tinggi ditangkap oleh petugas keamanan perusahaan. **Meskipun pihak perusahaan telah menyita tanah, air, hutan, dan sumber daya komunal lainnya dalam jumlah besar, perusahaan menganggap pencarian buah kelapa sawit yang tersisa sebagai pencurian.**

Ada juga banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan menganggap perempuan sebagai pekerja yang lebih akurat, hati-hati, dan rajin dan karenanya perusahaan mempekerjakan banyak buruh perempuan sebagai penanam benih dan untuk mengaplikasikan pupuk. Pengaplikasian pupuk sebenarnya merupakan aktivitas yang sangat beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan

perempuan. Pekerja laki-laki dipaksa untuk membawa anggota keluarga untuk membantu mereka mencapai target perusahaan. Tentu saja; istri dan anak-anak tidak dimasukkan sebagai penerima gaji. **Praktek perburuhan dari perkebunan kelapa sawit besar ini secara luas disebut sebagai bentuk perbudakan modern. (2)**

Kriminalisasi yang tinggi terhadap mereka yang menentang perkebunan telah menyebabkan banyak penangkapan aktivis, dan bahkan pembunuhan. Perempuan yang kehilangan suami, ayah atau anak lelaki mereka terpaksa untuk mendapatkan uang untuk mempertahankan keluarga sambil tetap mengurus pekerjaan rumah tangga. Beban ganda ini sangat sulit bagi perempuan untuk memulai pekerjaan mereka sebelum matahari terbit dan mengakhirinya lama setelah matahari terbenam.

Tetapi para perempuan juga menderita jenis kekerasan lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan, polisi dan militer, yang kemudian memperkuat peran, posisi, dan hubungan gender yang melekat pada mereka.

Memanfaatkan fitrah "perempuanan"

Ketika perempuan berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka dan menyangkal keberadaan perkebunan kelapa sawit, mereka mengalami kriminalisasi dan kekerasan lebih lanjut.

Penting untuk dicatat bahwa ada kerentanan yang lebih tinggi bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu pelanggaran adalah yang menargetkan "keperempuanan" mereka yang bertujuan untuk membungkam perjuangan mereka. **"Fitrah perempuan" dalam hal ini didefinisikan sebagai hubungan konstruksi sosial, budaya dan agama dengan fungsi dan peran perempuan, yang sebagian besar masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki.**

Konflik terjadi tidak hanya karena perbedaan persepsi antara masyarakat lokal dan pelaku industri kelapa sawit, baik perusahaan dan pemerintah, tetapi juga karena pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam mengelola sumber daya kehidupan mereka, terutama sebagai penjaga dan pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial, telah diabaikan. Maka wajar untuk mengatakan bahwa mengabaikan entitas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan sebagai bagian dari tatanan sosial berarti

mengabaikan keberadaan entitas tersebut; dan itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Jaringan

WALHI - Sahabat Bumi Indonesia

(1) Meretas Jejak Kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, sebuah tawaran dialog (Komnas Perempuan 2008) https://issuu.com/walhi/docs/temuan_awal-sebuah_tawaran_dialog

(2) See SawitWatch (in Bahasa): <http://sawitwatch.or.id/2016/02/catatan-singkat-akhir-tahun-perburuhan-sawit-watch-2015/>

Article from the WRM Bulletin 197, December 2013, <http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/modern-day-slavery-in-oil-palm-plantations-the-outstanding-cases-of-malaysia-and-indonesia/>

Accenture for Humanity United: Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry

http://humanityunited.org/pdfs/Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf

Schuster Institute for Investigative Journalism: Forced Labor and Child Labor on Palm Oil Plantations

<http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!/slavery-palm-oil-plantations-indonesia/cqcc>

Ketidakadilan agribisnis dan lingkungan: Dampak terhadap kesehatan perempuan pedesaan

Artikel ini mengupas tentang bagaimana pengaturan dan pembagian kerja secara seksual dan ketidakamanan pekerjaan dalam kegiatan perkebunan tanaman tunggal mempengaruhi kesehatan pekerja perempuan dan bagaimana transformasi teritorial yang ditimbulkan oleh model hutan produksi ini secara langsung mempengaruhi nasib perempuan.

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara Amerika Latin menjadi sasaran intervensi sebagai akibat dari kebijakan pembangunan berdasarkan eksploitasi sumber daya alam yang intensif dan ekspor barang-barang primer dengan nilai tambah rendah. Kebijakan ini telah memperkuat sektor-sektor seperti agribisnis dan pertambangan (SVAMPA, 2012). Di Brazil, situasi ini telah mengarah pada kemajuan daerah perbatasan pertanian, yang menimbulkan serangkaian ketidakadilan yang berdampak kepada lingkungan dan kesehatan karena model produksi agribisnis menyebabkan terjadinya perluasan perkebunan tanaman tunggal, konsentrasi tanah, mekanisasi sarana produksi, proletarisasi populasi pedesaan dan penggunaan intensif pupuk kimia dan agrotoksin (RIGOTTO, 2011).

Menanggapi situasi ini, Pusat Pekerjaan, Lingkungan dan Kesehatan (TRAMAS Nucleus) dari Fakultas Kedokteran Universitas Federal Ceará (UFC) telah melakukan penelitian dan kajian selama lebih dari sepuluh tahun tentang **dampak terhadap lingkungan dan kesehatan populasi di daerah-daerah di mana agrotoksin digunakan**. Fokus utama penelitian kami adalah wilayah Chapada do Apodi, yang terletak di wilayah Baixo Jaguaribe di Negara Bagian Ceará di timur laut Brasil. Sejak 1980-an, wilayah Chapada do Apodi telah menderita konsekuensi negatif dari kebijakan irigasi yang mengubah wilayah ini menjadi salah satu lokasi utama pengembangan pertanian semi-kering di wilayah timur laut di negara itu, terutama setelah pembentukan perimeter irigasi Jaguaribe-Apodi. .

Pada awal 2010, Tramas Nucleus UFC melaporkan bahwa penyebaran agribisnis - khususnya perkebunan tanaman tunggal - telah menyebabkan proses deterritorialisasi yang keras dan mengganggu cara hidup dan produksi masyarakat lokal. Hasil penelitian juga menyoroti gambaran serius tentang pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat akibat agrotoksin dan memburuknya masalah sosial yang mampu mempengaruhi lingkungan, pekerjaan dan kesehatan populasi dari wilayah tersebut (RIGOTTO, 2011).

Setelah memahami bahwa konsekuensi negatif dari proses ketidakadilan lingkungan terjadi secara tidak proporsional pada segmen populasi yang paling rentan, khususnya pada perempuan, pada tahun 2013 UFC Tramas Nucleus meluncurkan kajian tentang paparan dan dampak agrotoksin terhadap kesehatan perempuan pedesaan di Baixo Jaguaribe Wilayah, Ceará. Penelitian, yang mempertimbangkan ketidaksetaraan gender, berfokus pada cara-cara bagaimana pengaturan dan pembagian kerja dan ketidakamanan gender dalam rantai produksi agribisnis telah berdampak pada kesehatan pekerja. Studi-studi tersebut juga memberikan analisis transformasi teritorial yang dihasilkan oleh model produksi ini dan perubahan yang dihasilkan pada faktor-faktor penentu sosial kesehatan yang secara langsung mempengaruhi perempuan.

Pemisahan gender dalam pekerjaan dan ketidakamanan kerja

Para peneliti telah menemukan bahwa pekerjaan perempuan dipengaruhi oleh **pemisahan berdasarkan jenis kelamin yang dipaksakan dengan tujuan menempatkan mereka ke pekerjaan yang sangat spesifik**. Selain kondisi kerja yang tidak sehat, pekerjaan yang biasanya disisihkan untuk perempuan adalah pekerjaan serba

cepat dan melibatkan banyak gerakan, yang memerlukan keterampilan seperti ketangkasan, fokus dan kesabaran. Seperti yang ditemukan oleh Marcondes et al. (2003), hal ini mengingatkan kami bahwa **perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan reproduksi, keterampilan ini dipandang sebagai sesuatu yang feminin dan, oleh karena itu, tidak dihargai, dan seringkali mereka banyak dieksploitasi oleh pengusaha.** Kualifikasi perempuan karenanya direndahkan dan tidak menghasilkan peningkatan upah; pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya, seperti yang kami amati bahwa **perempuan dibayar lebih rendah**, yang terlihat dari tingginya bonus produktivitas untuk pekerja laki-laki - setidaknya dua kali lipat - meskipun sebenarnya peningkatan produksi pekerja laki-laki bergantung langsung pada percepatan output tenaga kerja perempuan.

Masalah lain yang terkait dengan pembagian kerja berdasarkan gender adalah gagasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan harus lebih ringan. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan oleh perempuan terkait dengan risiko lain seperti gerakan berulang, kecepatan kerja yang intens, dan postur kerja yang salah. Banyak pekerja menderita WSI / WRMD (Cedera Regangan Berulang dan Gangguan Osteomuskuler yang Berhubungan Dengan Pekerjaan) karena posisi kerja yang tidak menguntungkan, gerakan berulang dan ketidakmampuan untuk bergerak bebas. Namun, keluhan tentang masalah ini diperlakukan oleh perusahaan sebagai keluhan non-spesifik dan perempuan harus menghadapi penolakan terhadap perubahan tugas atau bahkan untuk perawatan perhatian medis yang layak (ROCHA dan RIGOTTO, 2017).

Salah satu faktor yang memperburuk kondisi tidak sehat dari pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan adalah **paparan produk kimia yang tidak diketahui dan racun pertanian**, yang merupakan karakteristik dari model pertanian perkebunan tanaman tunggal. ABRASCO Dossier memperingatkan bahwa di antara "dampak kesehatan yang terkait dengan proses produksi agribisnis, yang paling relevan dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah kontaminasi dan keracunan akut dan kronis yang disebabkan oleh penggunaan racun agro" (CARNEIRO et al., 2015, p. 109, terjemahan pribadi). Kami mengamati bahwa penggunaan agro toksin yang intensif dan penyalahgunaannya, kurangnya informasi dan pelabelan produk yang tidak efisien menyulitkan pekerja dan masyarakat umum untuk memahami risiko racun ini. Kami memverifikasi bahwa peserta penelitian tidak tahu produk kimia apa yang mereka hadapi,

meskipun mereka semua mengeluh tentang bau produk dan mengatakan bahwa, tergantung pada pekerjaan yang ditugaskan, mereka dapat merasakan efek terhadap tubuh mereka akibat paparan agrotoksin ini. Mereka menyebutkan gejala seperti iritasi pada tenggorokan, mata dan sistem pernapasan. Penelitian ini juga mengidentifikasi serangkaian pelanggaran terhadap hak-hak yang dilakukan oleh perusahaan, **seperti membuat pekerja mengalami hari kerja berat yang melebihi yang ditentukan oleh undang-undang saat ini; tidak ada pembayaran lembur, pemaksaan bekerja; lingkungan kerja yang tidak sehat yang memaparkan perempuan pada risiko kecelakaan; pelecehan moral yang menjadi kebiasaan; dan pengabaian hak-hak khusus bagi pekerja hamil atau menyusui (ROCHA dan RIGOTTO, 2017).**

Meskipun para perempuan melaporkan bahwa agribisnis menawarkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang produktif, kami mengamati bahwa partisipasi ini berbahaya dan merendahkan, yang menghasilkan dan menekankan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat. **Selain itu, perempuan mengalami kerja ganda yang menjadi lebih intens, karena perempuan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan keluarga dan perlu merekonsiliasi ini dengan hari kerja panjang yang dipaksakan oleh perusahaan.** Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang produktif tidak mengurangi partisipasi mereka dalam bidang reproduksi. Sebaliknya, perubahan yang disebabkan oleh penggunaan baru waktu mereka menimbulkan hubungan buruk antara pekerjaan produktif di perusahaan dan reproduksi di rumah tangga yang memperdalam ketidaksetaraan antara pria dan perempuan.

Pemahaman tentang partisipasi mereka dalam dunia kerja produktif dan cara-cara di mana ruang produktif diartikulasikan dengan reproduksi sosial kehidupan sangat dibutuhkan untuk bisa merefleksikan makna dari proses kesehatan-penyakit dari perempuan yang tinggal di wilayah yang terkena dampak agribisnis. Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan bahwa **perubahan teritorial yang dipaksakan oleh perkebunan tanaman tunggal memiliki dampak tidak hanya pada mereka yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut, tetapi juga terhadap semua perempuan yang tinggal di wilayah itu, yang juga terkena proses kerentanan.**

Perubahan yang dilaporkan oleh perempuan di Chapada do Apodi yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka termasuk hilangnya akses ke tanah meliputi; hak air yang ada di tangan perusahaan-perusahaan besar, yang telah

menyebabkan kekurangan air; polusi air dan tanah oleh agrotoksin; peningkatan kerawanan pangan; arus migrasi pekerja laki-laki yang intens disebabkan oleh sifat musiman pekerjaan di perusahaan, yang mengarah ke peningkatan kasus kehamilan dini dan eksploitasi seksual; peningkatan perdagangan narkoba, kemungkinan didorong oleh perluasan distrik kota yang tidak teratur; dan peningkatan kekerasan (SILVA, RIGOTTO dan ROCHA, 2015). Perubahan-perubahan ini berdampak pada faktor-faktor penentu sosial kesehatan dan lebih banyak memberatkan perempuan mengingat bahwa dalam masyarakat patriarki ditandai oleh ketidaksetaraan gender, di mana perempuan mereka masih paling bertanggung jawab atas pekerjaan reproduksi sosial dan, termasuk untuk perawatan kesehatan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga unit keluarga dan komunitas.

Perempuan juga memainkan peran utama dalam mengawasi risiko kesehatan dan keluhan yang ditimbulkan oleh model perkebunan agro-ekspor. Sebagai contoh, **kelahiran anak-anak dengan kelainan bawaan dan kasus pubertas dini pada anak perempuan.** Hal ini dapat dilikat dari kasus-kasus yang dipelajari oleh Aguiar (2017) melalui anamnesis klinis, yang mengkaji evaluasi paparan lingkungan dan pekerjaan unit keluarga terhadap agrotoksin, analisis dari bahan aktif agrotoksin dalam darah dan urin, serta air yang dikonsumsi di rumah mereka. Dalam delapan kasus yang diteliti, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara penyakit dan agrotoksin, yang membenarkan persepsi dan kesimpulan yang dibuat para perempuan di komunitas ini..

Dengan demikian, kami mengamati bahwa para perempuan menjadi jembatan penghubung yang menjalin hubungan antara situasi ketidakadilan lingkungan dan pencemaran agrotoksin dengan peningkatan proses kerentanan dan dampak pada kesehatan, seperti: peningkatan kasus kanker, munculnya kasus malformasi atau cacat bawaan dan pubertas dini. Kejadian kasus WSI / WRMD, DI ANTARANYA penyakit kesehatan yang telah meningkat secara eksponensial di wilayah mereka sejak kedatangan perusahaan agribisnis. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat, mereka menjadi pihak yang paling berperan penting atas dialog yang dilakukan dengan Universitas, yang mendorong tuntutan untuk kajian dan penelitian. Perempuan-perempuan ini menunjukkan cara-cara yang membantu kami untuk memahami dan menganalisis situasi rumit yang berkembang dari ketidakadilan terhadap masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh agribisnis Amerika di wilayah tersebut.

Mayara Melo, professor at the Center for Health Sciences of the Federal University of Recôncavo da Bahia and researcher at UFC Tramas Nucleus.

Raquel Rigotto, coordinator of UFC Tramas Nucleus and member of GT Health and Environment of ABRASCO.

References:

- Aguiar, A. C. P. *Exposição aos agrotóxicos e efeitos crônicos sobre a saúde humana: uma “herança maldita” do agronegócio para a Chapada do Apodi (CE)*. Dissertation [Master in Collective Health] Universidad Federal de Ceará. Fortaleza, 2017.
- Carneiro, Fernando Ferreira (Org.) **Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde** / Organization of Fernando Ferreira Carneiro, Lia Giraldo da Silva Augusto, Raquel Maria Rigotto, Karen Friedrich and André Campos Búrigo. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/l241.pdf>
- Marcondes, W. B.; Rotenberg, L.; Portelall, L. F.; Moreno, C. R. C. *O peso do trabalho “leve” feminino à saúde*. São Paulo: *Perspectiva*. vol.17 no.2 São Paulo Abr./Jun. 2003. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000200010
- Rigotto, R. M. et al. **Agrotóxicos, trabalho e saúde – vulnerabilidade e resistência no contexto da modernização agrícola do Baixo Jaguaribe**, Ceará. 1ª Ed. Fortaleza: Editora UFC y Coedición Expressão Popular, 2011. <http://www.tramas.ufc.br/?p=518>
- Rocha, M. M.; Rigotto, R.M. *Produção de vulnerabilidades em saúde: o trabalho das mulheres em empresas agrícolas da Chapada do Apodi, Ceará*. *Saúde em Debate*, v. 41, p. 63-79, 2017. <https://scielosp.org/pdf/sdeb/2017.v41nspe2/63-79/pt>
- Silva, M. L. V.; Rigotto, R. M.; Rocha, M. M. *Agora é uma riqueza medonha e todo mundo é doente: repercussões da modernização agrícola sobre a saúde de mulheres camponesas na Chapada do Apodi/CE*. *Retratos de Assentamentos*, v. 18, p. 67-89, 2015. <http://retratosdeassentamentos.com/index.php/retratos/article/view/181>
- Svampa, M. *Pensar el desarrollo desde América Latina*. Buenos Aires, 2012. <http://www.maristellavampa.net/archivos/ensayo56.pdf>

Tersamar di Bawah Naungan Perusahaan Kelapa Sawit di Kamerun: Menceritakan Kembali Penganiayaan yang Diderita Perempuan

Perkebunan semakin mengelilingi dan menenggelamkan masyarakat. Perempuan harus berjalan melalui tanah perusahaan untuk mencari mata pencaharian, yang beresiko membahayakan nyawa mereka.

Krisis pangan dan keuangan tahun 2008 tidak diragukan lagi membuat banyak investor melirik Afrika, yang merupakan salah satu fokus transaksi tanah skala besar. Investor semakin banyak meminta lahan subur yang luas, yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat. Investasi Langsung Asing juga terkait dengan akuisisi aset pertanian (1). Seringkali, permintaan akan lahan ini dibuat dengan tujuan untuk sistem pertanian

monokultur yang luas. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini di negara-negara berkembang secara umum, dan di Kamerun khususnya, terus membawa masalah yang rumit bagi masyarakat.

Kami dapat menyebutkan perusahaan yang beroperasi di Kamerun, seperti PAMOL (Kamerun), HEVECAM (Singapura), SGSOC (Amerika Serikat), SOSUCAM (Prancis) dan SOCAPALM (Luksemburg). Sebagai pengguna utama lahan, perempuan seringkali paling terkena dampak. Mereka mengutuk penghancuran mata pencaharian mereka demi keuntungan perusahaan, yang menyebabkan kerawanan pangan. Mereka juga mengutuk ketidakstabilan pekerjaan, serta kurangnya kebebasan untuk datang dan pergi melalui lahan yang sebelumnya mereka kembangkan, karena takut akan penangkapan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi situasi perempuan di dalam dan di sekitar perkebunan industri di Kamerun yang **menunjukkan kerusakan dan pelecehan yang diderita perempuan, terkait dengan tanah dan masyarakat.**

Konflik pertanahan: Pelanggaran hak penggunaan lahan, kekerasan dan intimidasi

Perluasan perkebunan industri, seperti kelapa sawit di Kamerun, membutuhkan lahan yang luas, yang akibatnya mengurangi ruang yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat lokal - khususnya perempuan.

"Permintaan biofuel akan lahan mengancam tergesurnya tanaman seperti singkong, kacang tanah, sorgum dan jagung yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat untuk digantikan dengan bahan bakar *biofuel* ini. Produk yang tidak dapat dimakan (...) juga secara langsung bersaing dengan produk pertanian untuk tanah subur (...), merupakan ancaman bagi masyarakat miskin dan menaikkan harga bahan pangan ...

"(2) Perempuan pedesaan paling terpengaruh oleh situasi ini, karena mereka menggunakan tanah dan produk-produknya sebagai sumber pendapatan dan penghidupan untuk rumah mereka. **Kelangkaan lahan adalah salah satu penyebab utama situasi sulit perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan industri. Selain itu, perkebunan semakin mengelilingi dan menenggelamkan masyarakat.** Situasi ini menciptakan masalah nyata dalam pengelolaan hubungan antara perusahaan dan populasi masyarakat, yang mengancam penganiayaan dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan dari perusahaan.

Faktanya, selama beberapa tahun, perempuan yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan agroindustri di Kamerun menderita kekerasan fisik dan psikologis, terutama ketika mencari sumber mata pencaharian mereka — yang menjadi langka karena kehadiran industri-industri ini. Kebun mereka, yang dulunya dekat dengan rumah mereka, sekarang menjadi cukup jauh. Bagi WHO, kekerasan dapat didefinisikan sebagai “penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik secara sengaja - apakah bersifat ancaman atau nyata - terhadap seseorang, orang lain atau kelompok atau komunitas, yang menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, perkembangan gangguan atau kesulitan. ”

Kasus-kasus penyerangan dan perkosaan yang kadang-kadang bahkan menyebabkan kematian para perempuan ini juga telah ditemukan. Dalam kasus ini, para perempuan hanya berusaha untuk mengamankan kelangsungan hidup keluarga mereka, dengan memetik beberapa biji sawit di perkebunan perusahaan. Mereka dituduh mencuri dan menderita serangan oleh hampir selalu di tangan pekerja keamanan yang disewa oleh perusahaan. Selain bertahan terhadap serangan verbal, mereka juga harus bertahan dari ancaman dan serangan fisik.

Memang, sudah ada banyak kasus kekerasan yang terdokumentasi dari perkebunan **perusahaan, SOCAPALM**, yang dilakukan oleh karyawan keamanan yang dikontrak (3). Meskipun penyerangan dan perkosaan ini semakin berkurang frekuensinya, penting untuk menunjukkan bahwa situasi ini telah menimbulkan semacam penyakit kejiwaan di kalangan perempuan yang tinggal di dekat perkebunan. Seorang perempuan yang tinggal di dekat perkebunan di daerah ini menjelaskan kepada kami bahwa ia dulu bisa pergi ke ladang sendirian di pagi hari, tetapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Dia mengatakan bahwa **perempuan pergi berkelompok, karena takut bahwa penjaga kebun akan menyerang mereka.** Singkatnya, para perempuan pedesaan ini, yang sebagian besar belum bersekolah dan malu dengan situasi mereka, sering lebih suka diam tentang pelecehan yang mereka alami. **Situasi ini sangat jelas; namun, akan terus diabaikan jika masyarakat sipil tetap diam.** Selain kekejaman yang disebutkan, ada banyak bentuk pelecehan lain yang dialami perempuan yang bekerja di agribisnis.

Pelanggaran Sosial: Antara ketidakadilan dan pemisahan keluarga

Kombinasi faktor-faktor risiko tertentu — seperti kelangkaan lahan, tekanan yang diberikan pada lahan, krisis pangan, dan pendapatan yang menurun dari perkebunan pedesaan —

telah mendorong perempuan mencari kesejahteraan yang lebih baik dengan mencari pekerjaan di agribisnis yang berdekatan. Perempuan kemudian dipaksa untuk bekerja di perkebunan di mana mereka menghadapi banyak ketidakadilan lainnya, dan yang menyebabkan perpisahan keluarga. Jadwal mereka membuat mereka tidak bisa merawat anak-anak mereka, karena mereka tidak memiliki jadwal kerja yang tetap.

Ny. X percaya bahwa **“bekerja di perusahaan-perusahaan ini sangat menyusahkan, dan dalam kasus terburuk, bisa berarti hampir jatuh ke dalam perbudakan. Beban kerja terkadang berlipat ganda ketika kami selesai lebih awal. karena penghitungan dilakukan berdasarkan tugas-demi-tugas; itu berarti bahwa selama tugas itu belum selesai, itu tidak masuk hitungan.**” Para perempuan ini kadang-kadang memiliki tugas yang sangat sulit untuk dilakukan mengingat kondisi fisik mereka, tetapi karena takut diberhentikan, mereka merasa wajib untuk mematuhi; mereka juga menghadapi risiko bahwa tugas yang telah mereka selesaikan tidak dihitung di akhir hari itu. Menurut pendapatnya, perempuan **“tidak memiliki hak untuk berbicara dan keluhan mereka tidak dipertimbangkan; sebaliknya, pengaduan menyebabkan hilangnya bonus dan tunjangan.**” Dan yang paling menyedihkan adalah, gaji mereka tidak memungkinkan mereka untuk makmur atau mengurus keluarga mereka.

Paksaan dan ketidakadilan tampaknya merupakan makanan sehari-hari perempuan yang tinggal di dekat perkebunan. **Mereka tidak memiliki hak untuk mengeluh, karena takut akan pembalasan yang dapat menyebabkan hukuman tindak disiplin.** **“Kami tidak boleh mengeluh, [karena] konsekuensi langsungnya adalah pemindahan yang tidak memperhitungkan situasi perkawinan Anda. Saya tinggal di Douala bersama keluarga saya; mereka menugaskan saya ke Kribi, jadi saya harus meninggalkan suami dan anak-anak saya, "dan dia menambahkan:" ini tidak adil dan membuat saya sedih.**”

Kategori lain perempuan yang bekerja di agribisnis adalah mereka yang direkrut oleh perantara yang artinya perempuan-perempuan ini tidak berhak atas tunjangan apa pun (asuransi, perlindungan medis, cuti hamil, dll.)

Sebagai kesimpulan, jelas bahwa perilaku investor asing di tanah subur di Kamerun adalah masalah besar yang perlu ditanggapi dengan sangat serius, terutama karena hak-hak perempuan sering diinjak-injak — padahal, seperti yang kami ketahui, perempuan adalah ibu dari masyarakat di Afrika. Sehingga, mereka yang tinggal di dekat perkebunan

setiap hari akan menuntut hak mereka untuk diperhitungkan; sementara mereka yang bekerja di perusahaan menuntut keadilan dan kondisi kerja yang lebih baik.

Michele ONGBASSOMBEN , michelebatende [at] yahoo.fr

Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), www.cedcameroun.org

(1) Berdasarkan data pemerintah, Negara Kamerun menerima CFA sebanyak 348.2 Milyar francs dalam foreign direct investment (FDI) tahun 2013. Hanya 4.1 Milyar francs CFA yang terkait dengan sector pertanian. Lihat: <http://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2309-5666-le-cameroun-a-capte-348-milliards-de-fcfa-d-investissements-directs-etranagers-en-2013>

(2) MUNZARA, A. 2011. Perampasan lahan merusak ketahanan PANGAN DI Afrika Barat (Land grabbing undermines food security in West Africa, FECCIWA/ACCEAO)

(3) <http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-2706.htm>

Articles of the Bulletin can be reproduced and disseminated using the following source: **Bulletin 236 of the World Rainforest Movement (WRM): "Women, tree plantations and violence: building resistance"** (<https://wrm.org.uy/>)

Subscribe to WRM bulletin here:

<http://wrm.us9.list-manage.com/subscribe?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=a6356dc0e0>

The Bulletin aims to support and contribute to the struggle of Indigenous Peoples and traditional communities over their forests and territories. Subscription is free.

Bulletin of the World Rainforest Movement

This Bulletin is also available in French, Spanish and Portuguese

Editor-in-Chief: Winfridus Overbeek

Managing Editor: Joanna Cabello

Editorial Assistants: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Jutta Kill, Carolina Motoki y Teresa Pérez

WRM International Secretariat

Avenida General María Paz 1615 office 3. CP 11400. Montevideo, Uruguay

Phone/Fax: +598 26056943

wrm@wrm.org.uy | <http://www.wrm.org.uy>